

PENGANTAR AKUNTANSI: PANDUAN PRAKTIS UNTUK MEMAHAMI LAPORAN KEUANGAN

**Reny Dany Merliyana
Widya Sari
Wedia Hastuti
Rizal Zaelani
Abdurohim**



GET PRESS INDONESIA

PENGANTAR AKUNTANSI: PANDUAN PRAKTIS UNTUK MEMAHAMI LAPORAN KEUANGAN

Penulis :

Reny Dany Merliyana
Widya Sari
Wedha Hastuti
Rizal Zaelani
Abdurohim

ISBN :

Editor : Diana Purnama Sari., S.E., M.E

Penyunting : Ari Yanto., M.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jln. Palarik Air Pacah No 26 Kel. Air Pacah
Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat

Website : www.getpress.co.id

Email : adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, September 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Pengantar Akuntansi: Panduan Praktis Untuk Memahami Laporan Keuangan ini.

Buku ini membahas Pengantar Pendahuluan Tentang Akuntansi, Proses Pembukuan, Analisis Laporan Keuangan, Prinsip-prinsip Akuntansi Khusus, Etika Dan Tanggung Jawab Profesional Dalam Akuntansi.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, September 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB 1 PENDAHULUAN TENTANG AKUNTANSI	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Definisi Akuntansi	1
1.3 Standar Akuntansi.....	3
1.4 Jenis-jenis Akuntansi	4
1.5 Profesi Akuntansi.....	5
1.6 Etika dalam Akuntansi	6
1.7 Metode Pencatatan Akuntansi	6
1.8 Siklus Akuntansi	8
1.9 Jurnal Khusus dan Jurnal Umum.....	10
1.10 Laporan Keuangan	12
1.11 Isu-isu Terkini tentang Akuntansi.....	15
DAFTAR PUSTAKA.....	16
BAB 2 PROSES PEMBUKUAN	17
2.1 Pendahuluan.....	17
2.2 Siklus Akuntansi dan Proses Pembukuan	18
2.3 Tahapan Pembukuan dalam Akuntansi	21
2.3.1 Mengumpulkan Data Transaksi, Mengidentifikasi, dan Menganalisisnya.....	21
2.3.2 Melakukan Pencatatan Transaksi dalam Jurnal.....	22
2.3.3 Membukukan Jurnal Transaksi ke General Ledger.....	23
2.3.4 Mengikhtisarkan dalam Trial Balance dan Membuat Adjusting Entries	24
2.3.5 Menyusun kembali Neraca Saldo Setelah Penyesuaian	25
2.3.6 Membuat Laporan Keuangan.....	25
2.3.7 Membuat Jurnal Penutup.....	28
2.3.8 Menyusun Neraca Saldo Setelah Penutupan.....	28
2.3.9 Membuat Jurnal Pembalik.....	29
2.4 Contoh Penerapan Proses Pembukuan	29
DAFTAR PUSTAKA.....	32

BAB 3 ANALISIS LAPORAN KEUANGAN	33
3.1 Pendahuluan	33
3.2 Pengertian Laporan Keuangan	33
3.3 Pemahaman Neraca, Laporan Laba Rugi, dan Laporan Arus Kas	34
3.3.1 Pemahaman Neraca	34
3.3.2 Pemahaman Laporan Laba Rugi	38
3.3.3 Pemahaman Laporan Arus Kas	40
3.4 Pengukuran Kinerja Keuangan	42
3.5 Rasio Keuangan Sebagai Alat Analisis	43
DAFTAR PUSTAKA	47
BAB 4 PRINSIP-PRINSIP AKUNTANSI KHUSUS.....	49
4.1 Pendahuluan	49
4.2 Prinsip Akuntansi untuk Sektor Pemerintahan.....	49
4.2.1 Pengantar	49
4.2.2 Prinsip-Prinsip Dasar	50
4.3 Prinsip Akuntansi untuk Sektor Bisnis	51
4.3.1 Pengantar	51
4.3.2 Prinsip-Prinsip Dasar	51
4.4 Prinsip Akuntansi untuk Sektor Non-Profit.....	52
4.4.1 Pengantar	52
4.4.2 Prinsip-Prinsip Dasar	52
4.5 Jenis-jenis Prinsip Akuntansi Khusus	54
4.5.1 Prinsip Akuntansi Aset Tetap	54
4.5.2 Prinsip Akuntansi Persediaan	55
4.5.3 Prinsip Akuntansi Investasi	56
4.5.4 Prinsip Akuntansi Piutang Tak Tertagih	57
4.5.5 Prinsip Akuntansi Pendapatan	59
4.5.6 Prinsip Akuntansi Beban	61
4.5.7 Prinsip Akuntansi Transaksi Berlebihan dan Kekurangan.....	63
4.5.8 Prinsip Akuntansi Peristiwa Kontijensi.....	65
4.5.9 Prinsip Akuntansi Perubahan Kebijakan Akuntansi 67	
4.6 Kesimpulan	69
DAFTAR PUSTAKA	71

BAB 5 TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL

DALAM AKUNTANSI..... 75

5.1 Pengertian Tanggung Jawab Profesional dalam
Akuntansi..... 75

5.2 Prinsip-Prinsip Etika dalam Akuntansi.....76

5.3 Kerahasiaan Informasi dalam Praktik Akuntansi 77

5.4 Tanggung Jawab terhadap Pemangku Kepentingan..... 78

5.5 Tantangan dalam Mempertahankan Tanggung
Jawab Profesional 79

5.6 Konflik Kepentingan dalam Profesi Akuntansi..... 81

5.7 Peran Pendidikan dalam Memperkuat Tanggung
Jawab Profesional 82

5.8 Pentingnya Sertifikasi dan Akreditasi..... 83

5.9 Kesimpulan dan Implikasi untuk Profesi Akuntansi..... 86

DAFTAR PUSTAKA..... 90

BIODATA PENULIS

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Akuntansi sebagai Penyedia Informasi bagi Penggunaanya.....	2
Gambar 1.2. Siklus Akuntansi	9
Gambar 1.3. Penyajian Laporan Keuangan	14
Gambar 2.1. Siklus Akuntansi secara umum.....	21
Gambar 3.1. Laporan Neraca Bentuk Staffel.....	36
Gambar 3.2. Laporan Neraca Bentuk Skontro.....	37

BAB 1

PENDAHULUAN TENTANG AKUNTANSI

1.1 Pendahuluan

Dalam keseharian kehidupan kita, tidak ada satupun hal yang tidak berhubungan dengan uang, dan tidak ada satupun barang yang diperjualbelikan tanpa menggunakan perantara uang, baik itu uang tunai maupun uang elektronik.

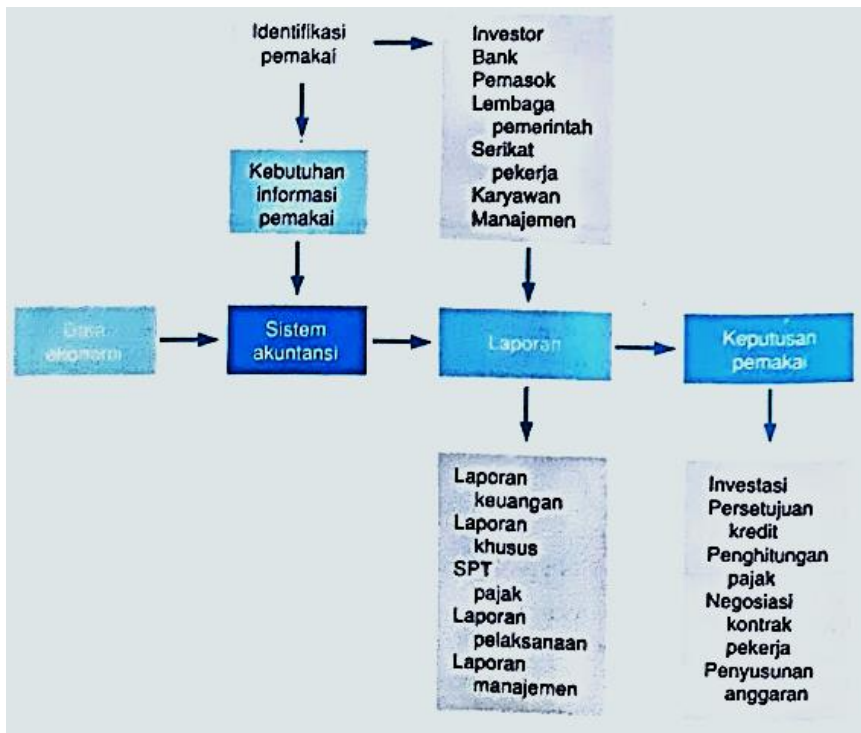
Pengelolaan keuangan atas pengeluaran dan pemasukan rumah tangga dan bisnis, diatur melalui ilmu akuntansi. Selain itu, kehidupan kita tidak luput dari transaksi bisnis, dan berbagai pihak akan terlibat saat kita berbisnis, misalnya: masyarakat, karyawan, investor, kreditor, *supplier* maupun pemerintah. Semua pihak yang terlibat tersebut disebut sebagai para pemangku kepentingan. Untuk dapat memberikan pertanggungjawaban yang baik kepada para pemangku kepentingan, diperlukan ilmu akuntansi yang akan menterjemahkan transaksi bisnis yang terjadi kedalam suatu pelaporan keuangan yang dapat diterima secara universal.

1.2 Definisi Akuntansi

Akuntansi berperan sangat penting dalam dunia bisnis, dimana perhitungannya digunakan pihak internal perusahaan melalui *middle management* bagi pengambilan keputusan operasional, dan pihak eksternal (para pemangku kepentingan) sebelum mereka memberikan keputusan investasi maupun pendanaan dengan melihat kinerja perusahaan melalui laporan keuangan perusahaan.

Adapun pengertian akuntansi itu sendiri yaitu sistem informasi yang dianggap sebagai bahasa bisnis yang menyajikan informasi bisnis untuk para pemangku kepentingan atas kegiatan transaksi dan informasi bisnis perusahaan (Warren *et al.*, 2022). Kegiatan identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian informasi

ekonomi entitas bisnis untuk para pemangku kepentingannya merupakan arti lain dari akuntansi (Surya, 2013). Melakukan pencatatan, pengelompokkan/pengikhtisaran, pelaporan suatu data ekonomi yang kemudian diinterpretasikan dalam suatu laporan yang ditujukan ke suatu kelompok dalam sistem ekonomi dan sosial merupakan tujuan dari akuntansi (Niswonger *et al.*, 1995). Jadi, akuntansi dapat diartikan sebagai alat bisnis yang memberikan informasi berupa kegiatan bisnis suatu usaha melalui sistem informasi untuk menghasilkan laporan sebagai alat komunikasinya kepada para *stakeholder* yang terkait dengan perusahaan tersebut.



Gambar 1.1. Akuntansi sebagai Penyedia Informasi bagi Penggunaanya
Sumber: (Niswonger et al., 1995)

1.3 Standar Akuntansi

Seorang akuntan yang merupakan bagian dari manajemen perusahaan ketika melakukan pencatatan sampai menghasilkan laporan keuangan harus mengikuti aturan dan prinsip dari Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sehingga laporan tersebut memudahkan pihak berkepentingan dalam memahami laporannya karena dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain.

Adapun panduan penting dalam teori akuntansi yang dianut oleh Indonesia (Surya, 2013) ialah:

1. *Generally Accepted Accounting Principal* (GAAP) yang kemudian ditransformasi di Indonesia menjadi Prinsip-prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU). PABU ini digunakan sebagai panduan untuk menyusun laporan keuangan yang mencakup prinsip entitas (prinsip dimana aktivitas entitas dicatat dan dipisahkan sesuai kebutuhan pihak pemangku kepentingan), dan disajikan dengan prinsip moneter (satuan mata uang).
2. *International Financial Reporting Standards* (IFRS) yang merupakan Standar Akuntansi Keuangan Internasional yang diterbitkan oleh *Internasional Accounting Standards Board* (IASB) yang menjadi rujukan utama global yang disesuaikan tersendiri oleh masing-masing negara di dunia untuk menghasilkan Standar Akuntansi suatu negara.
3. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). IAI sendiri merupakan organisasi profesi Akuntan Indonesia yang bertanggungjawab dalam mengembangkan dan memperbaharui standar akuntansi di Indonesia. Semua pelaporan keuangan entitas yang sajikan bagi pihak eksternal di Indonesia, pencatatannya mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh IAI melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK).

Perkembangan akuntansi keuangan di dunia bisnis sejalan dengan perubahan sistem perekonomian dan perkembangan teknologi informasi (teknologi komputer dan komunikasi). Proses

pekerjaan pencatatan data klerikal yang sebelumnya dilakukan manual, dewasa ini dilakukan secara komputerisasi berkat adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (Santoso, 2010).

1.4 Jenis-jenis Akuntansi

Adanya perkembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, serta para pengguna informasi akuntansi yang berbeda kepentingan dan tujuannya, menyebabkan ilmu akuntansi dikelompokkan dalam beberapa jenis berikut:

1. **Akuntansi Keuangan** yang berkaitan dengan proses pencatatan transaksi perusahaan melalui penyusunan berbagai laporan periodik yang tersusun atas catatan transaksi tersebut yang menghasilkan laporan keuangan perusahaan bagi pengambilan keputusan yang digunakan oleh pihak internal dan eksternal perusahaan.
2. **Akuntansi Manajerial** yang bertujuan bagi pengambilan keputusan manajemen (pihak internal) perusahaan dengan menggunakan data historis dan data estimasi/perkiraan yang dihitung dan dianalisa manajemen untuk menghasilkan keputusan keuangan terbaik yang efektif dan efisien di antara berbagai alternatif yang disajikan.
3. **Auditing** atau **Akuntansi pemeriksaan** yang berhubungan dengan suatu pemeriksaan terhadap berbagai catatan akuntansi yang dilakukan secara independen. Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh akuntan publik untuk menilai kelayakan laporan keuangan yang disajikan oleh suatu entitas.
4. **Akuntansi Biaya** yang berkaitan dengan penentuan dan penetapan keputusan manajemen atas biaya-biaya yang terjadi selama proses produksi sampai selesai produksi, yang bertujuan untuk pengendalian operasional dan perencanaan masa depan.
5. **Akuntansi Pajak** yang berkaitan dengan penyusunan laporan pajak dengan mempertimbangkan berbagai konsekuensi dan aturan perpajakan yang berlaku untuk

menghasilkan pelaporan pajak perusahaan melalui Surat Pemberitahuan Pajak.

6. **Sistem Akuntansi** yang berkaitan dengan perencanaan dan penerapan berbagai prosedur pengumpulan dan pelaporan data keuangan yang menggunakan sistem informasi akuntansi, teknologi dan komputerisasi.

1.5 Profesi Akuntansi

Seorang akuntan profesional bekerja di lingkungan, peran dan hasil laporan yang berbeda (Santoso, 2010). Setiap jenis akuntansi menghasilkan laporan yang berbeda dan penyusunan laporannya dilakukan oleh akuntan yang berbeda pula. Profesi akuntansi tersebut beserta perannya terbagi menjadi:

1. ***Financial Accountant (Akuntan Keuangan)***, berperan dalam menyusun laporan keuangan perusahaan, biasanya untuk kepentingan eksternal perusahaan.
2. ***Management Accountant (Akuntan manajemen)***, berperan menyusun laporan manajemen bagi internal perusahaan untuk pengambilan keputusan perusahaan.
3. ***Tax Accountant (Akuntan Pajak)***, berperan untuk melakukan tugas di bidang pajak perusahaan yaitu menyusun Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan perusahaan.
4. ***Internal Auditor (Auditor Internal)***, berperan dalam pemeriksaan laporan keuangan perusahaan, memeriksa laporan keuangan dan laporan manajemen yang dilakukan akuntan keuangan dan akuntan manajemen dan memberikan laporan hasil auditnya kepada senior manajemen apabila ditemukan temuan. Seorang auditor internal dituntut independen dan tidak memihak dalam melaksanakan tugasnya, ia juga berperan memberikan saran dan pendapatnya terhadap senior manajemen agar terwujudnya efisiensi dan efektifitas perusahaan.

1.6 Etika dalam Akuntansi

Akuntansi berperan menyediakan informasi keuangan yang relevan dan tepat waktu agar dapat menunjang informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan manajemen perusahaan. Oleh karena itu, seorang akuntan dan manajer wajib untuk menjunjung etika dan profesionalitasnya dalam melaksanakan tugasnya, agar kualitas laporan yang dihasilkan menjadi andal dan dapat dipercaya, mereka harus melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab, jujur dan berintegritas, serta tidak berperilaku curang untuk memperkaya diri sendiri.

Seorang akuntan dan manajer terkadang harus menghadapi tuntutan dan tekanan investor dan manajer senior untuk memenuhi keperluan mereka yang berdampak pada pertaruhan etika dan integritas profesinya, selain itu tuntutan kebutuhan dan keserakahan pribadi juga akan membuat akuntan dan manajer terdorong untuk melakukan *fraud* (kecurangan), yang berimbas pada kegagalan profesionalisme atas profesinya.

1.7 Metode Pencatatan Akuntansi

Proses pencatatan dan pengelompokkan laporan keuangan dilakukan berdasarkan ketentuan dalam persamaan akuntansi, dimana semua transaksi ekonomi terjadi. Ilmu akuntansi mencakup tiga kategori yaitu: aset, kewajiban, dan ekuitas, yang menghasilkan persamaan akuntansi:

$$\text{Aset} = \text{Kewajiban (liabilitas)} + \text{Ekuitas (ekuitas pemilik)}$$

Persamaan tersebut dikenal dengan persamaan akuntansi, dan posisi liabilitas/kewajiban yang merupakan hak kreditur harus lebih didahulukan perusahaan, dan selalu berada lebih dahulu sebelum ekuitas/hak pemilik (Warren et al., 2022). Sistem akuntansi dirancang, disusun dan dicatat dengan rinci, dan terpisah atas semua transaksi bisnis perusahaan yang menghasilkan akun-akun atau perkiraan untuk menunjukkan kenaikan maupun penurunan atas saldo dari masing-masing komponen dalam laporan keuangan (Hery, 2009).

Tabel 1.1. Pengelompokkan Akun atas Komponen Laporan Keuangan

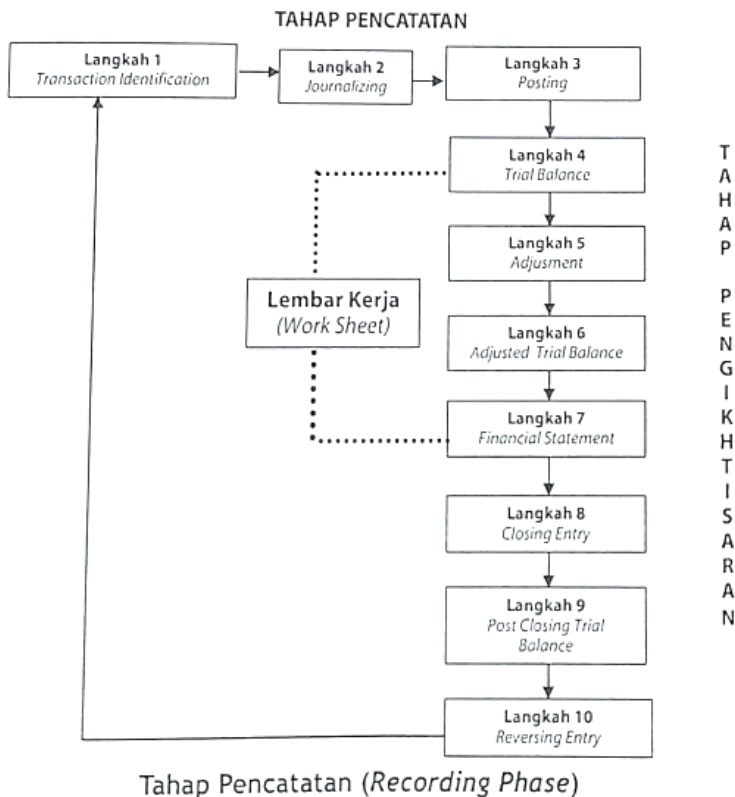
No	Klasifikasi	Definisi dan Contoh
1	Aset/Aktiva (<i>Asset</i>)	Yaitu harta/kekayaan dan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Contoh Akunnya: aset lancar (misal: kas, piutang, perlengkapan); dan aset tetap/tidak lancar (misal: tanah, gedung, mesin, kendaraan).
2	Kewajiban (<i>Liabilities</i>)	Yaitu kewajiban pembayaran atas klaim aset perusahaan yang dimiliki kreditur dan pihak eksternal lain akibat transaksi masa lalu perusahaan. Contoh Akun: Utang, dan Sewa dibayar dimuka.
3	Ekuitas (<i>Equity</i>)	Yaitu nilai sisa dari hasil pengurangan aset dengan kewajiban perusahaan yang menjadi hak bagi pemilik perusahaan. Contoh Akun: Modal, dan Prive.
4	Pendapatan (<i>Revenues</i>)	Yaitu penerimaan berupa pemasukan manfaat ekonomi yang muncul karena adanya aktivitas operasional perusahaan berupa pembuatan suatu produk atau pelayanan jasa dalam suatu periode tertentu. Contoh akun: Pendapatan Usaha, Pendapatan Bunga, dan Pendapatan Sewa.
5	Beban (<i>Expenses</i>)	Yaitu pengeluaran atau penggunaan aktiva yang mengakibatkan berkurangnya aset dan peningkatan liabilitas yang terjadi akibat kegiatan operasional perusahaan (pembuatan produk, pelayanan jasa, dan kegiatan lain) selama periode tertentu. Contoh akun: Beban Gaji, Beban Sewa Gedung, Beban Air dan Listrik, dan lain-lain).

1.8 Siklus Akuntansi

Prosedur pencatatan atau tahapan dalam pencatatan transaksi akuntansi yang dilakukan secara benar, terbagi dalam dua tahap yaitu pencatatan dan pengikhtisaran, disebut sebagai proses atau siklus akuntansi. Tahapan pencatatan yang dilakukan saat terjadinya transaksi bisnis, berupa tahapan dasar pencatatan sebagai berikut:

1. Menganalisis setiap transaksi dan mengkategorikannya pada berbagai akun baik itu aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, ataupun beban.
2. Masukkan informasi transaksi tersebut kedalam jurnal.
3. Pindahkan/posting informasi data jurnal yang telah dikelompokkan ke akun buku besar umum (*general ledger*).
4. Susun neraca saldo untuk menguji apakah penjurnalan dan kegiatan posting ke buku besar yang telah dilakukan, sudah dilaksanakan dengan benar.
5. Membuat jurnal penyesuaian, dilakukan pada akhir periode akuntansi untuk memperbaharui data laporan keuangan sehingga sesuai dengan konsep akrual dan penandingan akuntansi. Akun yang terlibat dalam jurnal penyesuaian yaitu akun riil: aktiva, kewajiban, dan kepemilikan, dan akun nominal: pendapatan dan beban. Penyesuaian terhadap akun riil dan akun nominal tersebut kemudian berpengaruh terhadap laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan.
6. Neraca saldo setelah penyesuaian dibuat setelah jurnal penyesuaian dan buku besar, dilakukan untuk memastikan bahwa semua transaksi dan penyesuaian akun telah dicatat dengan benar untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat.
7. Penyusunan Laporan Keuangan dilakukan jika seluruh akun sudah dilakukan penyesuaian, data transaksinya didapatkan dari saldo akun dalam buku besar yang telah disesuaikan ataupun melalui *worksheet* (kertas kerja). Jenis Laporan Keuangan ada lima, yaitu: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

8. Ayat Jurnal Penutup, dilakukan untuk mempersiapkan akun untuk periode masa yang akan datang dengan mengurangi saldo akun nominal menjadi nol, dimana saldo akun pendapatan dan beban ke akun ikhtisar laba-rugi secara periodik pada akhir periode akuntansi.
9. Neraca Saldo setelah jurnal penutup, bertujuan untuk mendapatkan keseimbangan dalam persamaan akuntansi, berisi saldo akhir dari masing-masing akun dalam neraca menjadi saldo awal bagi akun periode berikutnya, dan juga saldo akun prive/dividen dan saldo akun dalam laba-rugi menjadi bersaldo "0".
10. Ayat jurnal pembalik, dibuat optional untuk membalikkan ayat jurnal penyesuaian yang telah dibuat pada akhir periode sebelumnya.



Gambar 1.2. Siklus Akuntansi. Sumber: (Santoso, 2010)

1.9 Jurnal Khusus dan Jurnal Umum

Pencatatan dan pengklasifikasian transaksi ekonomi suatu entitas sebelum memposting ke Buku Besar dan Menyusun Laporan Keuangan ialah dengan menyusun Jurnal. Jurnal digunakan bagi entitas untuk melakukan pencatatan secara kronologis berdasarkan urutan waktu atas terjadinya transaksi untuk mencatat berbagai transaksi entitas secara sistematis. Jurnal terbagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Jurnal Umum (*General Journal*), dibuat umumnya untuk entitas relatif kecil yang memiliki berbagai transaksi yang tidak terlalu kompleks dan masih sedikit. Perusahaan kecil tersebut cukup membuat satu jurnal saja yaitu jurnal umum. Selain itu bagi perusahaan yang relatif besar dan memiliki transaksi lebih kompleks, jurnal umum dibuat untuk mencatat berbagai transaksi yang tidak dicatat di jurnal khusus. Contohnya: pemberian potongan penjualan untuk pelanggan, penerimaan utang wesel, dan lainnya.
2. Jurnal Khusus (*Special Journal*) digunakan untuk mencatat berbagai transaksi harian yang sejenis yang dilakukan berulang. Jurnal khusus digolongkan dalam empat jenis yaitu:
 - a. Jurnal Penjualan/*Sales Journal* digunakan untuk mencatat berbagai transaksi penjualan persediaan yang dilakukan secara kredit.
 - b. Jurnal Pembelian/*Purchase Journal* digunakan untuk mencatat berbagai transaksi pembelian barang yang dilakukan secara kredit.
 - c. Jurnal Penerimaan Kas/*Cash Receipt Journal* digunakan untuk mencatat berbagai transaksi penjualan persediaan secara tunai dan mencatat tagihan atas piutang dagang dan piutang lain yang muncul pada periode tersebut.
 - d. Jurnal Pengeluaran atau Pembayaran Kas/*Cash Payment Journal* digunakan untuk mencatat berbagai transaksi atas pengeluaran kas yang muncul pada periode tersebut yang dilakukan secara tunai, contohnya: pembelian persediaan secara tunai, pelunasan utang, pembelian perlengkapan dan peralatan kantor secara tunai.

Contoh soal Pencatatan Transaksi ke Jurnal Umum:

PD Anugrah Bersama selama bulan April 2024, telah melakukan beberapa transaksi sebagai berikut:

- 1. 1 April: pemilik menyetorkan uang kas sebesar Rp.40.000.000,- sebagai modal awal di bulan April
- 2. 5 April: pembayaran sewa ruko untuk bulan April sebesar Rp.9.000.000,-
- 3. 6 April: pembayaran utang usaha ke PT Agatama sebesar Rp.2.400.000,-
- 4. 10 April: Diterima kas sebagai penerimaan piutang dari Tn. Agus sebesar Rp.1.000.000,-
- 5. 15 April: Pembelian barang dagangan sebagai persediaan sebesar Rp.6.000.000,- secara tunai
- 6. 20 April: pembayaran tagihan listrik dan air untuk bulan April sebesar Rp.1.000.000,-
- 7. 25 April: pembayaran gaji pelayan toko dan administrasi untuk bulan April sebesar Rp.2.000.000,-

Diminta:

Berdasarkan transaksi-transaksi tersebut, buatlah jurnal umum PD Anugrah Bersama untuk bulan April 2024!

Jawaban:

Tanggal	Akun dan Keterangan	Ref.	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1 April	Kas		40.000.000	
	Modal Pemilik			40.000.000
5 April	Beban Sewa Ruko		9.000.000	
	Kas			9.000.000
6 April	Utang Usaha PT Agatama		2.400.000	
	Kas			2.400.000
10 April	Kas		1.000.000	
	Piutang Tn. Agus			1.000.000
15 April	Persediaan Barang Dagang		6.000.000	
	Kas			6.000.000
20 April	Beban Listrik dan Air		1.000.000	
	Kas			1.000.000

25 April	Beban Gaji Pegawai		2..000.000	
	Kas			2.000.000

1.10 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu penyajian yang terstruktur atas posisi dan kinerja keuangan suatu entitas, yang bertujuan untuk memberikan informasi dan pengambilan keputusan bagi pengguna laporannya mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas (Kieso *et al.*, 2018).

Hasil pertanggungjawaban mengenai laporan penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada manajemen perusahaan disebut sebagai Laporan keuangan (Martani *et al.*, 2016).

Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas dengan menerapkan PSAK secara benar disertai pengungkapan yang diharuskan PSAK dalam catatan atas laporan keuangan (IAI, n.d.).

Laporan keuangan disusun untuk mengkomunikasikan berbagai informasi atas transaksi yang sudah terjadi sebagai laporan pertanggungjawaban akuntansi dalam satu periode akuntansi kepada pihak yang berkepentingan bagi perusahaan. Terdapat lima jenis laporan keuangan yang harus disusun oleh suatu entitas, yaitu:

1. **Laporan Laba Rugi/*Income Statement*** merupakan laporan yang disusun untuk menyajikan ikhtisar atas operasional perusahaan yang mencakup berbagai transaksi pendapatan dan beban atas perusahaan tersebut selama satu periode (bulan atau tahun).
2. **Laporan Ekuitas Pemilik** merupakan ikhtisar laporan yang menyajikan berbagai transaksi yang menimbulkan perubahan pada ekuitas/modal pemilik dalam satu periode baik bulanan maupun tahunan. Laporan ini disusun setelah laporan laba rugi dan sebelum laporan posisi keuangan, karena berperan sebagai penghubung dari kedua laporan tersebut (Warren *et al.*, 2022).
3. **Laporan Posisi Keuangan** dahulu dikenal dengan Neraca merupakan penyajian laporan yang disajikan pada tanggal tertentu (akhir bulan/akhir tahun) mencakup pencatatan mengenai aktiva, kewajiban dan modal pemilik perusahaan.

4. **Laporan Arus Kas** merupakan ikhtisar dari suatu entitas atas penerimaan dan pengeluaran kas selama suatu periode tertentu baik dalam kurun waktu sebulan ataupun setahun. Laporan ini terdiri dari tiga aktivitas perusahaan, yaitu: aktivitas operasional, aktivitas pendanaan dan aktivitas investasi.
5. **Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)** merupakan penjelasan naratif mengenai rincian jumlah yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas sebagai bagian integral dari laporan keuangan (Martani *et al.*, 2016). CaLK mencakup: Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan; Kebijakan akuntansi spesifik yang digunakan; Informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian lain laporan keuangan; dan Informasi tambahan yang tidak disajikan di bagian lain laporan keuangan tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.

SolusiNet	
Laporan Laba Rugi	
Untuk Bulan yang Berakhir pada 30 November 2015	
Pendapatan jasa	Rp 1.500.000
Beban:	
Beban upah	Rp 125.000
Beban sewa	800.000
Beban perlengkapan	800.000
Beban utilitas	450.000
Beban lain-lain	275.000
Total beban	4.450.000
Laba neto	Rp 1.050.000

SolusiNet	
Laporan Ekuitas Pemilik	
Untuk Bulan yang Berakhir pada 30 November 2015	
Modal, Cristina, 1 November 2015	Rp -
Investasi 1 November 2015	Rp 25.000.000
Laba neto November	1.050.000
Dikurangi penarikan	Rp 28.050.000
Kenaikan pada ekuitas pemilik	2.000.000
Modal, Cristina, 30 November 2015	26.050.000
	Rp 26.050.000

SolusiNet	
Laporan Posisi Keuangan	
30 November 2015	
Aset	Liabilitas
Kas	Rp 400.000
Perlengkapan	550.000
Tanah	20.000.000
Total aset	Rp 26.450.000
	Utang usaha
	Ekuitas Pemilik
	Modal, Cristina
	26.050.000
	Total liabilitas dan ekuitas pemilik
	Rp 26.450.000

SolusiNet	
Laporan Arus Kas	
Untuk Bulan yang Berakhir pada 30 November 2015	
Arus kas dari aktivitas operasi:	
Kas diterima dari pelanggan	Rp 7.500.000
Dikurangi pembayaran kas untuk beban dan kepada kreditur	(4.600.000)
Arus kas neto dari aktivitas operasi	Rp 2.900.000
Arus kas dari aktivitas investasi:	
Pembayaran kas untuk pembelian tanah	(20.000.000)
Arus kas dari aktivitas pendanaan:	
Kas diterima sebagai investasi pemilik	Rp 25.000.000
Dikurangi penarikan kas oleh pemilik	(2.000.000)
Arus kas neto dari aktivitas pendanaan	23.000.000
Kenaikan neto dalam kas dan saldo kas 30 November 2015	Rp 5.900.000

Gambar 1.3. Penyajian Laporan Keuangan
Sumber (Warren *et al.*, 2022)

1.11 Isu-isu Terkini tentang Akuntansi

Beberapa topik yang sedang menjadi perhatian dalam dunia akuntansi dewasa ini diantaranya ialah:

1. Akuntansi Keberlanjutan dan Pelaporan ESG (*Environmental, Social, and Governance*) dimana perusahaan semakin dituntut untuk melaporkan dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola mereka. Mencakup pelaporan mengenai: emisi karbon, praktik ketenagakerjaan, dan struktur tata kelola perusahaan.
2. Teknologi *Blockchain* dalam Akuntansi, yang berpotensi mengubah cara pencatatan dan audit transaksi keuangan, meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko kecurangan.
3. *Artificial Intelligence* (AI) dan *Machine Learning* dalam Akuntansi, digunakan untuk mengotomatisasi tugas-tugas akuntansi rutin, meningkatkan analisis data, dan memperbaiki proses audit.
4. Akuntansi untuk Aset Kripto, akibat adanya peningkatan akan penggunaan *cryptocurrency*, aset digital ini mendorong kebutuhan untuk standar akuntansi yang jelas.
5. *Cybersecurity* dalam Akuntansi, adanya peningkatan pada ancaman keamanan siber menuntut akuntan untuk memahami dan mengelola risiko keamanan atas data keuangan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hery. (2009), *Akuntansi Keuangan Menengah I*, Ed. 1, Cet., PT Bumi Aksara, Jakarta.
- IAI. (n.d.). *PSAK 13 (2015) Properti Investasi*, Jakarta.
- Kieso, D.E., Weygandt, J.J. and Warfield, T.D. (2018), *Intermediate Accounting: IFRS Edition*, edited by Hoboken, N., 3rd ed., John Wiley & Sons.
- Martani, D., Siregar, Veronica, S., Wardhani, R., Farahmita, A. and Tanujaya, E. (2016), *Akuntansi Keuangan Menengah, Berbasis PSAK*, Edisi 2, B., Salemba Empat, Jakarta.
- Niswonger, C.R., Fess, P.E. and Warren, C.S. (1995), *Prinsip-Prinsip Akuntansi*, Edisi 16 (, Erlangga, Jakarta.
- Santoso, I. (2010), *Akuntansi Keuangan Menengah*, Buku Satu., PT Refika Aditama, Bandung.
- Surya, R.A.S. (2013), *Pengantar Akuntansi Berbasis IFRS*, Pertama., Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Warren, C.S., Reeve, J.M., Duchac, J., Wahyuni, E.T. and Jusuf, A.A. (2022), *Pengantar Akuntansi 1 Adaptasi Indonesia*, 4th ed., Salemba Empat, Jakarta.

BAB 2

PROSES PEMBUKUAN

2.1 Pendahuluan

Pembukuan adalah salah satu proses penting dalam suatu bisnis. Namun masih ada pemilik bisnis yang kurang memperhatikan hal ini dengan serius. Umumnya karena hanya memfokuskan kepada cara supaya jasa atau barang dapat dikenal publik dan banyak terjual. Seharusnya, walaupun belum banyak transaksi yang terjadi, kegunaan pembukuan tetap terasa, termasuk juga pada bisnis yang baru didirikan dengan skalanya yang belum membesar, di mana tak jarang masih belum memahami benar terkait bagaimana mengalokasikan dana serta modal.

Dikarenakan terdapat banyak manfaat, antara lain sebagai alat yang digunakan dalam penilaian kondisi keuangan dan menaksir perkembangan serta kemampuan entitas dalam menghasilkan keuntungan. Oleh sebab itu, pembukuan sangat krusial bagi usaha atau bisnis, baik yang masih berukuran kecil, apalagi jika perusahaan sudah besar.

Secara sederhana dapat diartikan bahwa pembukuan adalah proses melakukan pencatatan transaksi keuangan harian. Dalam proses ini, harus dicatat uang yang keluar dan juga uang yang masuk, karena dokumentasi merupakan suatu yang sangat penting dan pemilik bisnis harus pandai mengatur keuangannya.

Sebagai bentuk dari proses mencatat transaksi secara periodik, pembukuan harus dilakukan secara teratur untuk dapat mengumpulkan data dan informasi keuangan secara lengkap. Data dan informasi tersebut mencakup aset, utang dan kewajiban lainnya, ekuitas, pendapatan, serta beban dan biaya, demikian juga terkait besaran harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa. Penyusunan laporan keuangan berbentuk

neraca dan laporan laba rugi pada periode terkait menjadi penutup dari proses tersebut (UU RI No. 28 Tahun 2007).

Dalam menjalankan sebuah organisasi ataupun bisnis, dimungkinkan peran proses pembukuan dalam pelacakan semua informasi keuangan yang diperlukan. Informasi ini penting agar pimpinan organisasi ataupun pemilik bisnis lebih mudah dalam membuat keputusan pembiayaan dan operasional yang sepatutnya untuk masa selanjutnya.

Melalui pembukuan yang efektif, akan memudahkan untuk memastikan pencatatan serta pengelolaan harta dan kewajiban finansial suatu bisnis secara akurat dan efisien. Hal-hal tersebut pastinya sangat membantu dalam proses pengambilan keputusan bisnis oleh pihak *intern*, contohnya dalam mengalokasikan margin dan profit. Demikian juga dalam pengambilan keputusan oleh pihak luar entitas, misalnya menjadi preferensi investor untuk mendanai operasional bisnisnya. Pembukuan oleh entitas juga sangat penting demi kelangsungan usaha dan menghindari kesimpangsiuran antara keuangan yang dikhususkan untuk kepentingan bisnis dengan keuangan pribadi pemiliknya.

Beberapa fungsi yang bermanfaat apabila dilakukannya kegiatan pembukuan dalam usaha skala kecil hingga skala besar (Suyono, 2022), antara lain yaitu :

1. Memonitor biaya operasional usaha.
2. Mengontrol harta dan laba rugi usaha untuk keberlanjutan periode mendatang.
3. Memastikan besaran pajak yang harus dibayarkan.
4. Meminimalisir risiko kehilangan uang, persediaan produk, ataupun asset lainnya.
5. Memiliki data jumlah tagihan piutang maupun utang.
6. Memantau kemajuan dari bisnis yang dijalankan.

2.2 Siklus Akuntansi dan Proses Pembukuan

Frasa yang hampir selalu digunakan di dalam sumber rujukan terkait konsep dasar akuntansi dan juga akuntansi keuangan, adalah proses pembukuan dan siklus akuntansi. Istilah itu dua-duanya mengarah pada rangkaian prosedur yang

bermanfaat dalam melakukan proses pada data transaksi di suatu entitas dan membentuk laporan keuangan.

Terminologi proses pembukuan dan siklus akuntansi, bagi sebagian orang dianggap serupa. Pada pembentukan suatu laporan keuangan secara periodik, proses pembukuan membutuhkan rangkaian prosedur yang berlaku terus menerus dalam melakukan proses pada data transaksi.

Sedangkan siklus akuntansi melanjutkan rangkaian kegiatan yang sama, tetapi dilanjutkan dengan aktivitas tambahan untuk memastikan bahwa catatan akuntansi disiapkan untuk digunakan pada periode mendatang (PPM SoM, 2022). Aktivitas tambahan yang dimaksud berupa pembuatan jurnal pembalik dan posting jurnal tersebut ke akun yang sesuai.

Disebutkan juga bahwa siklus akuntansi merujuk pada langkah-langkah kegiatan akuntansi yang diawali selesainya sesudah terjadinya peristiwa keuangan di suatu entitas (Fitria, 2014). Langkah-langkah tersebut berurutan dimulai dengan pencatatan, dilanjutkan dengan pengelompokan, kemudian peringkasan data keuangan yang telah terproses sebelumnya, dan ditutup dengan penyajian laporan keuangan. Di mana seluruh tahap aktivitas tersebut terjadi secara berulang.

Dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat, siklus akuntansi memainkan peran krusial. Siklus akuntansi yang akurat harus melewati tahap demi tahap agar menghasilkan *output* yang diharapkan. Sehingga penting untuk mengerti tahap-tahap siklus dan pandai menggunakannya sebagai alat pengambilan keputusan demi perkembangan bisnis secara terus menerus.

Jenis Siklus Akuntansi

Berikut ini jenis dari siklus akuntansi berdasarkan jenis kegiatan usahanya, yakni siklus akuntansi bagi :

1. Perusahaan Jasa

Perusahaan jasa merupakan bisnis yang menyediakan produk tidak berwujud. Mereka menawarkan layanan *intangible* seperti konsultasi atau pelayanan profesional.

Meskipun perusahaan jasa bergerak tanpa produk fisik, bisnis ini tetap memerlukan siklus akuntansi. Karena produk tidak berwujud dan abstrak yang dipasarkan tersebut tetap bermanfaat bagi *consumer* maupun *customer*, termasuk juga memberikan keuntungan bagi penyedia jasa.

Jasa profesional seperti akuntan dan kantor pengacara, jasa perjalanan wisata umum dan perjalanan ibadah, bimbingan belajar di bidang pendidikan, jasa keuangan di perbankan dan non-bank, serta masih banyak lagi lainnya, merupakan beberapa contoh entitas dengan bidang usaha jasa.

2. Perusahaan Dagang

Produk yang ditawarkan oleh perusahaan dagang pastinya merupakan barang berwujud dan dapat dimiliki konsumennya. Dikarenakan perusahaan dagang merupakan entitas bisnis yang terlibat dalam jual-beli barang fisik, maka mereka memiliki prosedur-prosedur yang melibatkan proses membeli, menyimpan, dan menjual barang. Pada umumnya, akun-akun semacam penjualan, biaya persediaan, dan harga pokok penjualan terdapat dalam akuntansi perusahaan dagang.

3. Perusahaan Manufaktur

Perusahaan manufaktur merupakan entitas bisnis yang mengolah material dasar menjadi suatu produk berupa barang setengah jadi maupun produk barang jadi, yang memiliki nilai jual, dengan melalui beberapa tahap pengerjaan. Proses di perusahaan tersebut juga melibatkan pembelian, penyimpanan, dan penjualan barang. Sehingga dalam siklus akuntansi perusahaan manufaktur, pada umumnya terdapat akun penjualan, harga pokok produksi, biaya operasional, harga pokok penjualan, persediaan bahan baku, persediaan produk setengah jadi atau barang dalam proses, persediaan produk jadi, dan lain-lain.

Memahami siklus akuntansi adalah faktor penting untuk dapat mengatur kondisi finansial suatu entitas dan mengambil

keputusan yang tepat. Manajemen harus memastikan setiap langkah diterapkan dengan cermat untuk membangun fondasi keuangan yang kokoh, apapun jenis usaha yang dijalankan.

Di bawah ini digambarkan siklus akuntansi yang dapat diterapkan secara umum di berbagai jenis entitas :



Gambar 2.1. Siklus Akuntansi secara umum
(Sumber : Yanti, 2024)

2.3 Tahapan Pembukuan dalam Akuntansi

Berikut ini adalah alur proses dan urutan membuat pembukuan sesuai akuntansi secara tepat (MRB Finance, 2024) :

2.3.1 Mengumpulkan Data Transaksi, Mengidentifikasi, dan Menganalisisnya

1. Pengumpulan Data Transaksi

Proses pengumpulan data transaksi keuangan mengawali tahap pembukuan di suatu entitas. Data tersebut terdokumentasi dalam bentuk bukti transaksi. Bukti transaksi antara lain yaitu ; kuitansi, faktur, nota, , surat pernyataan piutang, dokumen kerjasama, bukti transfer rekening bank, dan berbagai macam bentuk lainnya.

2. Identifikasi Transaksi

Proses selanjutnya yakni mengidentifikasi setiap transaksi yang telah dikumpulkan datanya. Transaksi yang

secara langsung berpengaruh pada perubahan status keuangan perusahaan dan dapat dievaluasi secara objektif, haruslah seluruhnya dicatat. Unit kerja akuntansi secara cermat dan akurat menyelesaikan tugas identifikasi ini, untuk menentukan kebenaran status dan nilai transaksi tersebut.

3. Menganalisis Transaksi

Langkah berikutnya adalah memeriksa setiap transaksi yang telah dilakukan. Akuntan harus bisa menentukan pengaruh transaksi tersebut, sebab hasil analisis transaksi dapat berdampak pada status keuangan perusahaan.

Sebagai metode pencatatan, digunakan *double-entry system* dalam akuntansi. Oleh karena itu, transaksi akuntansi memengaruhi debit dan kredit keuangan dengan cara yang sama (PPM SoM, 2022).

Secara sistematis, menggunakan persamaan :

$$\text{Aset} = \text{Kewajiban} + \text{Ekuitas}$$

Kemudian diperluas juga dengan persamaan :

$$\text{Aset} = \text{Kewajiban} + \text{Ekuitas} + \text{Pendapatan} - \text{Biaya}$$

2.3.2 Melakukan Pencatatan Transaksi dalam Jurnal

Setelah dilakukan analisis bukti transaksi, dilanjutkan ke tahap menginput nilai yang diakui ke dalam jurnal transaksi. Ini sering disebut dengan proses pencatatan atau “menjurnal”. Jurnal adalah catatan transaksi secara berurutan sesuai tanggal dan selama periode waktu tertentu. Sedangkan, penjurnalan adalah tindakan memasukkan informasi tersebut (PPM SoM, 2022).

Di *double-entry system*, masing-masing transaksi pada dua bagian selama proses penjurnalan, yaitu dalam bentuk debit dan kredit. Di mana jumlah yang ada di posisi debit harus selalu sesuai dengan jumlah yang ada di posisi kredit. Pencatatan harus dilakukan secara teliti dan sistematis. Sehingga pada laporan akhir akan didapatkan jumlah debit dan kredit yang sama.

Proses penjurnalan boleh saja dilakukan sekaligus setelah transaksi selama satu hari terkumpul, namun lebih baik lagi segera menjurnal setiap kali ada transaksi baru agar tidak ada yang terlewat. Pada era komputerisasi, umumnya penjurnalan dilakukan dengan penginputan ke dalam sistem atau software akuntansi. Keseluruhan data akan diproses oleh sistem atau software akuntansi dan dapat disajikan secara cepat serta meminimalisir kesalahan, sehingga pembukuan menjadi sistematis dan terperinci.

Secara umum, di dalam jurnal transaksi, sekurang-kurangnya tersedia beberapa informasi. Yaitu berupa tanggal transaksi, keterangan ataupun uraian transaksi, nomor bukti transaksi, akun-akun terkait, kolom debit, kolom kredit, dan saldo yang terkait.

2.3.3 Membukukan Jurnal Transaksi ke *General Ledger*

Tahap berikutnya, catatan transaksi pada jurnal dipindahkan ke dalam kelompok akun atau rekening atau pos-pos, sesuai dengan jenis transaksinya. Oleh karena itu, proses ini dikenal juga dengan istilah "*posting*". Sedangkan kelompok akun atau kelompok rekening tersebut diistilahkan *general ledger* (buku besar).

General ledger juga dimaksudkan sebagai sekelompok rekening pembukuan yang merinci transaksi tertentu, demikian juga aset, kewajiban, dan ekuitas, yang dilaporkan pada suatu periode. Tentu saja di suatu entitas, terdapat berbagai rekening buku besar di sistem akuntansinya.

Pada tahapan ini, kode tertentu diberikan untuk masing-masing akun yang ada di *general ledger*. Hal ini sangat bermanfaat untuk memudahkan proses identifikasi dalam jurnal. Selain itu, jika transaksi dicatat dalam *general ledger*, akan lebih mudah untuk menelusuri kembali untuk diperiksa, atau juga melihat referensi terkait.

Di dalam *general ledger*, satu jenis transaksi berkumpul menjadi satu kelompok. Sebagai contoh, akun Aset Tetap terdiri atas transaksi yang terkait dengan aset tetap saja,

sedangkan akun Kas hanya terdiri atas transaksi yang menggunakan uang tunai.

Di akhir proses *posting* ini, nilai-nilai transaksi terkumpul membentuk jumlah yang disebut dengan saldo akhir. Posisi akhir tersebut, akan sesuai dengan jenis akunnya, sehingga dapat bersaldo debit atau bersaldo kredit.

2.3.4 Mengikhtisarkan dalam *Trial Balance* dan Membuat *Adjusting Entries*

1. Penyusunan *Trial Balance*

Penyusunan atau pengikhtisaran dalam *trial balance* (neraca saldo) menjadi langkah berikutnya dalam tahapan proses akuntansi yang harus diselesaikan oleh unit kerja akuntansi. Proses ini umumnya dilaksanakan setiap akan penutupan buku pada proses akuntansi.

Keseluruhan saldo akun *general ledger* dalam periode waktu tertentu tercantum dan disatukan di neraca saldo. Penyusunan *trial balance* memang dimaksudkan untuk memastikan bahwa nilai jenis akun bersaldo debit sama dengan jenis akun bersaldo kredit, yang disebut "*balance*". Atau secara keseluruhan, jumlah nilai transaksi debit seimbang dengan transaksi kredit.

Apabila setelah neraca saldo disusun dan didapati jumlah nilai yang tidak seimbang atau "*belum balance*", maka perlu memeriksa kembali pencatatan yang telah dilakukan sebelumnya.

Beberapa hal mungkin menjadi penyebab neraca saldo "*belum balance*", antara lain ialah didapatinya transaksi yang belum dicatat. Kemudian juga, transaksi yang salah hasil hitungannya, ataupun transaksi terinput ke akun yang tidak tepat, juga mengakibatkan tidak seimbangnya neraca saldo. Oleh karena itu, unit kerja akuntansi harus memastikan bahwa analisis transaksi dan penjurnalannya dilakukan dengan teliti.

2. Pencatatan *Adjusting Entries* (Jurnal Penyesuaian)

Penggunaan metode *accrual basis* di suatu entitas, berimplikasi pada perlunya dibuat penyesuaian pada akhir periode akuntansi, agar laporan keuangan menjadi aktual.

Tidak hanya itu, jika ternyata ada transaksi yang belum dicatat ataupun jika menemukan kesalahan dalam neraca saldo, maka masalah-masalah tersebut juga dapat dikoreksi dengan membuat jurnal penyesuaian.

2.3.5 Menyusun kembali Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

Pembuatan laporan neraca saldo setelah penyesuaian merupakan proses berikutnya dalam tahapan pembukuan. Neraca saldo awal yang sebelumnya telah disusun dan poin-poin jurnal penyesuaian yang telah dibuat, inilah yang menjadi dasar penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian.

Saldo terbagi lagi pada posisi debit dan kredit, serta ditentukan berdasar pada posisi normal masing-masing akun. Kemudian dilakukan penyusunan dan penghitungan, sehingga jumlah keseluruhannya sama besar di kedua posisi saldo tersebut. Jika terjadi kesalahan perhitungan, maka laporan keuangan tidak dapat dibuat.

2.3.6 Membuat Laporan Keuangan

Praktik akuntansi dan penyusunan laporan keuangan untuk entitas yang berdomisili di Indonesia, mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang telah disusun dan ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Terdapat empat pilar SAK yang saat ini berlaku di Indonesia, yakni SAK Internasional, SAK Indonesia, SAK Indonesia untuk Entitas Privat, dan SAK Indonesia untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah (EMKM) (IAI, 2024). Dalam penerapannya, entitas dapat memilih SAK yang sesuai dengan badan usahanya dan jenis transaksinya.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 201), dijelaskan bahwa laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur atas posisi keuangan entitas, demikian juga dengan kinerja keuangannya (IAI, 2024). Laporan-laporan yang disajikan memperlihatkan hasil pertanggung-jawaban

manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Kesimpulannya ialah laporan keuangan merupakan *output* dari proses pembukuan yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan dan aktivitas suatu entitas dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan ini menjadi bagian paling penting karena akan memengaruhi pengambilan keputusan oleh para *stakeholders* terkait.

Secara umum, entitas harus menyiapkan lima komponen laporan keuangan. Laporan dianggap lengkap jika kelima komponen tersebut disajikan dengan baik. Komponen tersebut yaitu :

1. Laporan Posisi Keuangan (*Statement of Financial Position*) atau Neraca (*Balance Sheet*)

Merupakan komponen laporan yang menunjukkan jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas dari suatu entitas pada tanggal tertentu. Atau disebut juga laporan yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan entitas pada tanggal tertentu.

Sesuai PSAK 201, dijelaskan bahwa di dalam laporan posisi keuangan atau neraca, entitas menyajikan aset lancar terpisah dari aset tidak lancar, dan kewajiban jangka pendek terpisah dari kewajiban jangka panjang (IAI, 2024). Ditentukan pula bahwa aset lancar disajikan menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya.

2. Laporan Laba Rugi (*Income Statement / Profit and Loss Statement*)

Sebagai komponen laporan yang menjabarkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh entitas serta beban yang terjadi selama periode tertentu. Dari perhitungan dalam laporan ini akan diketahui laba bersih atau rugi bersih suatu entitas. Disebut juga sebagai laporan yang menyajikan data terkait pendapatan, beban dan biaya, serta laba atau rugi yang dihasilkan oleh entitas untuk suatu periode tertentu.

Di samping itu, pada laporan laba rugi juga tersaji tentang perbandingan antara pendapatan dengan beban dan biaya entitas. Maksudnya yaitu, laba didapatkan suatu entitas jika total pendapatannya lebih besar daripada beban dan biaya yang dikeluarkan. Sebaliknya jika semua beban dan biaya yang dikeluarkan suatu entitas lebih besar daripada pendapatannya, maka entitas tersebut dikatakan mengalami rugi.

Dari laporan laba rugi dapat diketahui kinerja keuangan entitas. Oleh karena itu, laporan ini seringpula disebut laporan kinerja keuangan atau laporan operasional perusahaan. Di perusahaan dengan skala besar serta memiliki akuntabilitas publik, maka laporan ini dibuat lebih rinci dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan dan disebut sebagai Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain (IAI, 2024).

3. Laporan Perubahan Ekuitas (*Statement of Owner's Equity*)

Ini adalah komponen laporan yang menunjukkan perubahan modal pemilik entitas pada suatu periode. Sesuai PSAK 201, dijelaskan bahwa di dalam laporan ekuitas minimal tercantum informasi tentang modal yang disetor oleh pemilik, transaksi-transaksi dengan pemilik, saldo akumulasi dari setiap kelompok penghasilan komprehensif lain, dan laba yang didapatkan entitas pada periode tersebut ataupun rugi yang dialaminya (IAI, 2024).

4. Laporan Arus Kas (*Cash Flow Statement*)

Sebagai komponen laporan yang berisikan informasi aliran masuk dan aliran keluar kas di suatu entitas selama periode terkait. Bagi para *stakeholders*, informasi di laporan ini menjadi dasar untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, serta kebutuhan entitas dalam penggunaan arus kas tersebut (IAI, 2024).

5. Catatan atas Laporan Keuangan (*Notes to the Financial Statements*)

Merupakan komponen laporan yang menyajikan rujukan untuk informasi yang berhubungan atas setiap pos yang tercantum di laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas (IAI, 2024). Secara singkat, catatan atas laporan keuangan (CALK) ini berisikan tentang ulasan setiap akun yang ada di komponen laporan keuangan lainnya.

Selain itu struktur CALK harus menyajikan secara lengkap informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik yang digunakan. Komponen laporan ini juga harus mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK Indonesia, yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan.

2.3.7 Membuat Jurnal Penutup

Umumnya, jurnal penutup menjadi tahap terakhir pada pembukuan dalam akuntansi. Di akhir periode pembukuan, jurnal ini dibuat dengan menutup akun-akun yang tercantum dalam laporan laba rugi, atau disebut rekening nominal. Dengan cara menjadikan nilai setiap akun ke angka nol.

Jurnal penutup dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan dan juga melakukan evaluasi atas setiap tindakan yang diambil manajemen selama periode setelah rekening ditutup. Pada siklus berikutnya, jurnal penutup dapat membantu awal baru periode berikutnya.

2.3.8 Menyusun Neraca Saldo Setelah Penutupan

Di dalam tahapan pembukuan, tahap ini bersifat pilihan yang bukan keharusan. Sesudah jurnal penutup dibuat, berikutnya akan disusun kembali neraca saldo. Isi neraca saldo tersebut yaitu saldo-saldo rekening *general ledger* yang ada setelah jurnal penutup.

Pada akhirnya, neraca saldo hanya menunjukkan saldo untuk rekening yang permanen saja. Penyusunan tersebut

bertujuan untuk mendapatkan keyakinan yang andal terkait keseimbangan saldo.

2.3.9 Membuat Jurnal Pembalik

Langkah terakhir dari tahapan pembukuan dalam akuntansi adalah membuat jurnal pembalik. Tahap ini juga opsional, namun berguna untuk memberi kemudahan pencatatan transaksi tertentu yang akan terjadi berulang kali pada periode-periode selanjutnya.

Jurnal pembalik ini disusun pada awal periode berikutnya, dengan menggunakan jurnal penyesuaian sebagai rujukan dalam pembuatan jurnal ini. Di mana setiap transaksi dalam jurnal penyesuaian akan dibuatkan jurnal baliknya. Yang dimaksud adalah, transaksi yang awalnya kredit dan tercatat dalam jurnal penyesuaian akan berubah menjadi debit, demikian juga sebaliknya.

2.4 Contoh Penerapan Proses Pembukuan

Berikut ini disajikan beberapa contoh tentang penerapan proses pembukuan sesuai akuntansi, yang dapat membantu perusahaan mengelola keuangan mereka dengan lebih baik, antara lain :

Contoh 1 :

Perusahaan Jasa

PT. Jaminan Abadi bergerak di bidang jasa asuransi umum. Sebelum menerapkan proses pembukuan yang sesuai dengan siklus akuntansi yang seharusnya, perusahaan ini mendapati ketidakmudahan dalam pengelolaan tagihan piutang premi dan pembayaran dari nasabah asuransi. Hal-hal tersebut menyebabkan masalah arus kas.

Langkah-langkah perbaikan:

1. Identifikasi Transaksi

Setiap transaksi, termasuk penerimaan pembayaran dari nasabah dan pembayaran untuk pihak kedua yang terkait dengan PT. Jaminan Abadi, dianalisis dengan teliti.

2. Pencatatan dalam Jurnal

Transaksi penerimaan dicatat di dalam jurnal khusus penerimaan kas atau bank. Sedangkan transaksi pembayaran untuk pihak lain dicatat dalam jurnal pengeluaran kas atau bank.

3. Posting ke General Ledger

Setelah penjurnalan, data dipindahkan ke buku besar untuk memantau arus kas dengan lebih baik.

Pendapatan premi juga dirinci ke buku pembantu piutang, untuk memudahkan pemantauan piutang premi asuransi yang akan jatuh tempo dan meminimalisir tagihan terlambat dibayar.

Sedangkan utang biaya dirinci di buku pembantu utang.

4. Jurnal Penyesuaian

Menjelang akhir periode, bagian akuntansi membuat jurnal penyesuaian untuk mencatat pendapatan yang belum diterima dan biaya yang belum dibayar.

5. Laporan Keuangan

Selain laporan laba rugi dan neraca, berdasarkan jurnal penyesuaian, disusun laporan arus kas yang lebih akurat, sehingga PT. Jaminan Abadi dapat memantau arus kas dengan lebih baik.

Contoh 2 :

Perusahaan Manufaktur

PT Olahbaja Sinergi adalah perusahaan manufaktur yang mengolah lempengan baja menjadi peralatan kantor dan peralatan rumah tangga.

Sebelum menerapkan proses pembukuan yang sesuai dengan siklus akuntansi yang terstruktur, perusahaan tersebut kesulitan dalam pengelolaan inventaris dan biaya produksi.

Hal-hal tersebut menyebabkan ketidakakuratan dalam laporan keuangan dan mengganggu pengambilan keputusan.

Langkah-langkah perbaikan:

1. Identifikasi Transaksi
Seluruh transaksi, terutama yang terkait penjualan produk, pembelian bahan baku, dan biaya produksi, dianalisis dengan teliti.
2. Pencatatan dalam Jurnal
Setiap transaksi dicatat dalam jurnal umum dan biaya produksi dicatat dalam jurnal khusus.
3. Posting ke General Ledger
Untuk memberikan gambaran lengkap tentang posisi keuangan, data dari jurnal dipindahkan ke buku besar. Biaya-biaya terkait produksi juga secara detail dipindahkan ke buku pembantu biaya produksi.
4. Jurnal Penyesuaian
Sebelum periode berakhir, dibuat jurnal penyesuaian untuk mencatat hasil penjualan yang belum diterima serta mengakui beban dan pembelian yang belum terbayar.
5. Laporan Keuangan
Berdasarkan data yang telah disesuaikan, disusun laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas.
Di mana dalam laporan-laporan tersebut tergambar hal-hal yang perlu diperbaiki. Didapati pula bahwa biaya produksi dapat ditekan dengan mengelola inventaris lebih efisien. Sehingga keuntungan lebih meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitria, Dina. 2014. *Buku Pintar Akuntansi untuk Orang Awam & Pemula*. Jakarta Timur : Laskar Aksara.
- Hery. (2017). *Akuntansi untuk Firma dan Perseroan*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2024. *Standar Akuntansi Keuangan*. SAK online. <http://iaiglobal.or.id> (khusus anggota IAI)
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., dan Warfield, T. D. (2020). *Intermediate Accounting IFRS Edition*. 4th Edition. USA : John Wiley & Sons, Inc.
- PPM School of Management, 2022.
- Suyono, A. 2022. Jurnal Abdimas Multidisiplin (JAMU) Vol 1, No 1, 2022, 41-50 <https://doi.org/10.35912/jamu.v1i1.1401>
Sosialisasi Pembuatan Laporan Keuangan Klub pada Klub Bulutangkis di PB Tanjung Mas (Socialization of the Preparation of Club Financial Reports at the Badminton Club at PB Tanjung Mas) Universitas Islam Riau.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Warren, C. S., Reeve, J. M., dan Duchac, J. (2017). *Accounting*. 27th Edition. USA : Cengage Learning.
- www.bpk.go.id
- www.mrbfinance.com
- www.ojk.go.id
- Yanti, S. D. 2024. *11 Tahapan Siklus Akuntansi untuk membuat Laporan Keuangan*. <https://www.kitalulus.com/blog/bisnis/tahapan-siklus-akuntansi/>

BAB 3

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

3.1 Pendahuluan

Dalam dunia bisnis yang bergerak dinamis, pengambilan keputusan yang tepat dan cepat menjadi penentu utama keberhasilan suatu perusahaan. Untuk itu, laporan keuangan dan analisis keuangan hadir sebagai satu kesatuan alat keuangan yang memberikan wawasan mendalam kepada para pemangku kepentingan bisnis.

Dengan mengerti akan pentingnya laporan keuangan dan analisis keuangan, para pelaku bisnis atau internal manajemen perusahaan dapat membuat keputusan yang tepat dan efektif. Data keuangan tidak hanya sekadar kumpulan angka-angka, melainkan acuan untuk menuntun perusahaan menuju target kesuksesannya. Dengan memanfaatkan informasi ini dengan bijak, perusahaan dapat menghadapi tantangan dengan percaya diri dan memanfaatkan peluang dengan optimal (Sumiarta, 2024).

3.2 Pengertian Laporan Keuangan

PSAK No. 1/2017 Paragraf 3 Pengertian laporan keuangan dalam standar Akuntansi Keuangan adalah suatu laporan terstruktur dan memiliki persyaratan minimal isi yang menyajikan posisi keuangan serta kinerja keuangan dalam entitas. Laporan keuangan menyajikan kondisi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Informasi mengenai kondisi keuangan tersebut dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti manajemen perusahaan, pemberi pinjaman seperti bank, investor, hingga pemegang saham untuk menilai kinerja perusahaan dan menentukan langkah-langkah dalam kerjasama dengan perusahaan. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil kinerja manajemen perusahaan atas penggunaan sumber modal perusahaan yang dipercayakan kepada mereka (Gunsu, 2022).

Laporan keuangan menyajikan informasi terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu perusahaan. Menurut Kasmir (2019: 7), “Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan informasi keadaan keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan atas transaksi keuangan yang terjadi selama periode buku yang bersangkutan, yang berisi kinerja dan posisi keuangan dalam suatu perusahaan yang disajikan secara terstruktur dalam periode tertentu (Gunsu, 2022).

3.3 Pemahaman Neraca, Laporan Laba Rugi, dan Laporan Arus Kas

3.3.1 Pemahaman Neraca

Neraca keuangan adalah merupakan salah satu dari lima komponen laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai posisi aset, modal, dan kewajiban perusahaan. Di dalam laporan neraca, nominal aset perusahaan wajib sama perhitungannya dengan jumlah total modal dan kewajiban (OCBC NISP, 2023).

Neraca perusahaan dikatakan sehat apabila jumlah modalnya lebih besar dari kewajiban. Jika terjadi sebaliknya, artinya kondisi keuangan perusahaan berada dalam keadaan tidak sehat, karena sebagian besar aset yang dimiliki perusahaan dibiayai oleh hutang (OCBC NISP, 2023).

Komponen Laporan Neraca

Setelah pembahasan mengenai neraca, selanjutnya akan dibahas tentang komponen-komponen yang wajib ada dalam sebuah laporan neraca, yakni sebagai berikut (OCBC NISP, 2023):

1. Aktiva

Komponen pertama neraca keuangan adalah aktiva, istilah akuntansi dari “aset”. Aktiva (asset) dalam laporan neraca, terbagi menjadi dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Aktiva lancar adalah aset mudah dicairkan atau

dialihkan bentuknya, misalnya uang kas, surat berharga, piutang, stok, dan biaya DP.

Sementara itu, aktiva tidak lancar adalah aktiva yang tidak dapat dengan mudah dicairkan dalam waktu satu tahun, misalnya tanah, gedung, mesin, hak cipta, paten, dan brand.

2. Liabilitas

Komponen selanjutnya dalam laporan neraca adalah liabilitas, atau disebut juga dengan “kewajiban”. Terdapat dua jenis liabilitas yang disajikan dalam laporan neraca, yaitu liabilitas jangka pendek (utang lancar) dan liabilitas jangka panjang (utang tidak lancar). Yang dimaksud utang lancar adalah utang yang jatuh tempo pelunasannya di bawah satu tahun, misalnya tagihan listrik, biaya perawatan mesin rutin, pajak, dan gaji karyawan.

Sebaliknya, utang tidak lancar adalah hutang atau tagihan yang pembayarannya setelah satu tahun ke atas, misalnya pinjaman jangka panjang, dana pensiun, dan sebagainya.

3. Ekuitas

Komponen terakhir yang wajib dalam laporan neraca adalah ekuitas, atau disebut juga “modal”. Sebagai komponen terakhir dalam laporan neraca, modal adalah bagian hak milik perusahaan yang berupa selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada, dimana hak milik tersebut didapat baik dari pemilik maupun investor. Ekuitas yang terdapat dalam laporan neraca terbagi menjadi dua jenis, yaitu saham disetor dan laba ditahan.

Macam Laporan Neraca

Ada dua macam neraca paling umum dipakai di perusahaan, yaitu neraca staffel dan skontro. Selengkapanya tentang macam-macam laporan neraca adalah sebagai berikut (OCBC NISP, 2023):

1. Laporan Neraca Bentuk Staffel

Laporan neraca staffel adalah bentuk laporan keuangan yang disusun memanjang ke bawah, dimana sisi sebelah kiri adalah akun dan nominalnya terletak di sebelah kanan. Di dalam neraca bentuk staffel, urutan akun dimulai

dari atas berurutan ke bawah yaitu aktiva kemudian liabilitas, dan selanjutnya ekuitas, masing-masing hanya dipisahkan dengan spasi. Neraca bentuk staffel digunakan oleh perusahaan yang memiliki jumlah akun banyak. Contoh neraca keuangan berbentuk staffel yaitu berikut ini.

PT. JAYA PURNAMA LAPORAN NERACA KEUANGAN Untuk Periode Kuartal yang Berakhir Pada 30 April 2021	
ASET	
Aset Lancar	
Kas	26,550,000.00
Bank	57,250,000.00
Piutang Lain-Lain	32,000,000.00
Persediaan	132,500,000.00
Biaya Dibayar Dimuka	38,918,550.00
Jumlah Aset Lancar	287,218,550.00
Aset Tidak Lancar	
Inventaris	275,850,000.00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(4,750,000.00)
Jumlah Aset Tidak Lancar	271,100,000.00
JUMLAH ASET	558,318,550.00
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
Kewajiban Jangka Pendek	
Utang usaha	272,800,000.00
Ekuitas	
Modal Disetor	60,000,000.00
Laba Ditahan	225,518,550.00
Jumlah Ekuitas	285,518,550.00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	558,318,550.00

Gambar 3.1. Laporan Neraca Bentuk Staffel
Sumber: OCBC NISP

2. Laporan Neraca Bentuk Skontro

Sementara itu, neraca skontro adalah neraca memiliki bentuk mengarah ke samping atau horizontal, dengan akun aktiva, kewajiban, dan ekuitas yang dipisahkan menjadi dua

lajur. Akun aktiva berada di lajur pertama paling kiri, diikuti dengan nominalnya. Kemudian untuk akun kewajiban, dan akun ekuitas beserta nominalnya berada di lajur kedua atau sisi kanan sebelah aktiva. Neraca skontro biasa digunakan oleh perusahaan dengan jumlah akun sedikit (misalnya UKM), karena bentuknya yang lebih sederhana. Berikut ini contoh neraca keuangan bentuk skontro yang dapat Anda gunakan.

PT. JAYA PURNAMA			
LAPORAN NERACA KEUANGAN			
Untuk Periode Kuartal yang Berakhir Pada 30 April 2021			
ASET		KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
ASET LANCAR		KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Kas	26,550,000.00	Utang usaha	272,800,000.00
Bank	57,250,000.00		
Piutang Lain-Lain	32,000,000.00	EKUITAS	
Persediaan	132,500,000.00	Modal Disetor	60,000,000.00
Biaya Dibayar Dimuka	38,918,550.00	Laba Ditahan	225,518,550.00
Jumlah Aset Lancar	287,218,550.00	Jumlah Ekuitas	285,518,550.00
ASET TIDAK LANCAR			
Inventaris	275,850,000.00		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(4,750,000.00)		
Jumlah Aset Tidak Lancar	271,100,000.00		
JUMLAH ASET	558,318,550.00	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	558,318,550.00

Gambar 3.2. Laporan Neraca Bentuk Skontro
 Sumber: OCBC NISP

3.3.2 Pemahaman Laporan Laba Rugi

Pembukuan laba rugi (*income statement*) adalah sebuah laporan keuangan yang menunjukkan pendapatan dan biaya suatu perusahaan selama periode waktu tertentu, biasanya selama satu tahun atau satu kuartal (Senastri, 2024).

Komponen Laporan Laba Rugi

Laporan tentang laba rugi (*income statement*) mencakup beberapa komponen utama yang menggambarkan kinerja keuangan suatu perusahaan selama periode waktu tertentu. Berikut adalah beberapa komponen laporan laba rugi (Senastri, 2024):

1. Pendapatan / Penjualan

Pendapatan adalah sejumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari hasil penjualan barang atau jasa, yang merupakan sumber utama pemasukkan perusahaan dan dicantumkan pada bagian atas catatan laba rugi.

2. Harga Pokok Penjualan (HPP)

Adalah item-item yang menggabungkan biaya langsung yang terkait dengan penjualan produk untuk menghasilkan pendapatan. Biaya langsung yang dimaksud disini terdiri dari tenaga kerja, suku cadang, bahan baku, dan alokasi biaya lain seperti depresiasi.

3. Laba kotor.

Laba Kotor diperoleh dengan mengurangi Harga Pokok Penjualan dari total pendapatan penjualan produk atau jasa.

4. Beban Pemasaran, Periklanan, dan Promosi.

Sebagian besar bisnis baik berskala besar maupun kecil memiliki beberapa pengeluaran terkait dengan penjualan barang dan atau jasa. Biaya pemasaran, periklanan, dan promosi sering kali dikelompokkan menjadi satu kesatuan karena merupakan biaya yang serupa, yaitu terkait dengan penjualan produk atau jasa.

5. Beban Umum dan Administrasi (G&A).

Biaya G&A termasuk bagian penjualan, umum, dan administrasi yang berisi semua biaya tidak langsung lainnya

yang terkait dengan menjalankan bisnis. Biaya ini terdiri dari gaji dan upah, biaya sewa kantor, asuransi, biaya perjalanan dinas, dan terkadang depresiasi dan amortisasi, dan biaya-biaya operasional lainnya. Namun, khusus untuk depresiasi dan amortisasi biasanya disajikan di bagian tersendiri.

6. EBITDA.

EBITDA adalah singkatan dari istilah dalam Bahasa Inggris yaitu *Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization*. EBITDA ini tidak selalu ada di setiap laporan laba rugi. Dalam bahasa Indonesia yang dimaksud adalah Penghasilan sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi, dan Amortisasi. Ini dihitung dengan mengurangi biaya G&A (tidak termasuk amortisasi dan depresiasi) dari laba kotor.

7. Depresiasi atau Beban Penyusutan dan Amortisasi.

Depresiasi dan amortisasi adalah biaya non tunai yang dibuat oleh akuntan untuk menyebarkan biaya aset modal seperti Properti, Pabrik, dan Peralatan (PP&E).

8. Pendapatan Operasional (atau EBIT)

Pendapatan Operasional mewakili pendapatan yang diperoleh dari operasi bisnis reguler. Dengan kata lain, EBIT adalah laba sebelum pendapatan non-operasional, biaya non-operasional, bunga, atau pajak dikurangkan dari pendapatan.

Rumus Langsung EBIT:

EBIT = Total Penjualan Bersih - Harga Pokok Penjualan - Biaya Operasional

Rumus Tidak Langsung EBIT:

EBIT = Laba Bersih + Biaya Bunga + Pajak

9. Bunga.

Dalam laporan laba rugi (*income statement*), bunga terbagi menjadi beban bunga dan pendapatan bunga. Hal ini dilakukan untuk menyamakan perbedaan antara EBIT dan EBT. Beban bunga ditentukan oleh jadwal hutang.

10. Biaya lainnya

Perusahaan terkadang memiliki pengeluaran atau biaya lain yang unik sesuai industrinya. Pengeluaran lain mungkin termasuk: pemenuhan, teknologi, penelitian dan

pengembangan (R&D), kompensasi berbasis saham (SBC), biaya penurunan nilai, keuntungan/kerugian dari penjualan investasi, selisih kurs mata uang asing, dan biaya-biaya lainnya yang sesuai dengan jenis industri atau perusahaan.

11. EBT (Pendapatan Sebelum Pajak)

EBT adalah singkatan Bahasa Inggris yaitu *Earnings Before Tax*, atau dikenal juga sebagai pendapatan sebelum pajak, yang hasil perhitungannya didapat dengan mengurangi beban bunga dengan pendapatan operasional, yang mana merupakan subtotal terakhir sebelum sampai pada laba bersih.

12. Pajak penghasilan

Pajak penghasilan disini adalah pajak yang dikenakan pada pendapatan sebelum pajak. Dan besarnya beban pajak dapat berasal dari pajak masa kini dan pajak masa depan.

13. Pendapatan bersih

Pendapatan bersih adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan setelah semua pengeluaran bisnis, seperti pajak dan pemotongan, dibayar. Hal ini adalah jumlah yang mengalir ke laba ditahan di neraca, setelah dikurangi untuk setiap dividen.

3.3.3 Pemahaman Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan yang memuat informasi mengenai perubahan historis dalam kas dan setara kas suatu entitas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama suatu periode. (PSAK 207)

Kegiatan atau aktivitas yang ada dalam laporan arus kas:

1. Aktivitas operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas yang berasal dari penerimaan dan pengeluaran kas atau setara kas untuk kegiatan operasional perusahaan selama 1 (satu) periode akuntansi. Jumlah arus kas yang timbul dari aktivitas operasi adalah indikator utama untuk menentukan apakah operasi entitas telah menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi entitas,

- pembayaran deviden, dan pendapatan investasi baru tanpa bantuan sumber pendanaan dari luar. (PSAK 2)
2. **Aktivitas investasi**
Aktivitas investasi adalah aktivitas yang berasal dari penerimaan dan pengeluaran kas atau setara kas untuk kegiatan perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset non tetap keuangan lainnya. Pentingnya pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari kegiatan investasi dikarenakan arus kas ini menyajikan sejauh mana pengeluaran yang telah terjadi untuk sumber daya yang diinvestasikan untuk menghasilkan penghasilan dan arus kas masa depan (Tanjung, 2007).
 3. **Aktivitas pembiayaan**
Aktivitas pembiayaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang dan utang jangka panjang sehubungan dengan pendanaan deficit maupun penggunaan surplus dana perusahaan. Pentingnya pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan dikarenakan untuk memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal bagi perusahaan (Tanjung, 2007).

Terdapat 2 (dua) metode penyajian laporan arus kas:

1. Metode Langsung

Dalam metode langsung, arus kas yang berasal dari kegiatan operasional perusahaan dirinci menjadi arus kas masuk dan arus kas keluar. Arus kas masuk dan keluar dirinci lebih lanjut dalam beberapa jenis penerimaan atau pengeluaran kas (Susilowati, 2016). Dalam metode langsung pelaporan arus kas dilakukan dengan cara mengelompokkan penerimaan kas dan pengeluaran kas dari kegiatan operasi secara lengkap. Setelahnya baru dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan (Susilowati, 2016).

2. Metode Tidak Langsung

Dalam metode tidak langsung, arus kas dari kegiatan operasional dilakukan dengan cara laba bersih yang dilaporkan di laporan laba rugi dikoreksi dengan beberapa item akun seperti biaya penyusutan, kenaikan harta lancar dan utang lancar serta laba atau rugi karena pelepasan investasi. Perbedaan antara kedua metode arus kas ini terletak pada penyajian arus kas yang berasal dari kegiatan operasi (Susilowati, 2016). Dalam laporan arus kas metode tidak langsung ini, laba bersih (*net income*) telah disesuaikan dari pengaruh transaksi yang masih belum direalisasi dari arus kas masuk dan keluar seperti utang dan piutang. Selain itu juga menghilangkan pengaruh perkiraan yang terdapat dalam kelompok investasi dan pembiayaan yang tidak mempengaruhi kas seperti penyusutan, amortisasi, laba rugi dari penjualan aktiva tetap dan dari operasi yang dihentikan, dan laba rugi pembatalan utang (transaksi pembiayaan) (Harahap, 2005).

3.4 Pengukuran Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan memberikan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu yang menyangkut aspek pengumpulan dana maupun penyaluran dana, yang indikator pengukurannya didasarkan atas kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas (Jumingan, 2006:239). Naik atau turunnya kinerja keuangan dipengaruhi oleh kenaikan dari penjualan, firm debt, likuiditas dan ukuran perusahaan. Kenaikan penjualan berasal dari peningkatan penjualan yang terjadi dari tahun ke tahun. Kasmir (2010, hal 103) menyatakan bahwa Analisis laporan keuangan yang dilakukan perusahaan untuk mengukur kinerja keuangannya adalah dengan menggunakan metode analisis rasio keuangan.

3.5 Rasio Keuangan Sebagai Alat Analisis

Terdapat 4 (empat) jenis rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan (Agus Harjito dan Martono, 2011:53) yaitu:

1. Rasio Likuiditas (*liquidity ratio*)

Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi utang dan kewajiban jangka pendeknya.

Terdapat 2 (dua) rasio likuiditas yaitu:

a. *Current Ratio (Rasio Lancar)*:

merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan (Kasmir, 2019).

$$\text{Current Ratio (CR)} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

b. *Quick Ratio (Rasio Cepat)*

Merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar (utang jangka pendek) dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan (inventory) (Kasmir, 2019).

$$\text{Quick Ratio (QR)} = \frac{\text{Aktiva Lancar-Persediaan}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

2. Rasio Solvabilitas (*solvability ratio*)

Rasio solvabilitas adalah merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajiban jangka panjangnya. Terdapat 2 (dua) rasio solvabilitas yang dapat digunakan, yaitu:

a. **Debt To Equity Ratio (Rasio Hutang terhadap Modal Sendiri)**

Merupakan rasio yang digunakan untuk membandingkan jumlah utang perusahaan dengan modal pemilikinya. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan antara seluruh utang yang dimiliki perusahaan (baik utang lancar maupun tidak lancar) dengan seluruh ekuitas (modal) perusahaan (Kasmir, 2019).

$$\text{Debt to Equity Ratio (DER)} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

b. **Debt to Total Assets (Rasio Hutang terhadap Aktiva)**

Adalah rasio utang yang digunakan untuk menilai perbandingan antara seluruh utang (kewajiban) perusahaan dengan total aktiva perusahaan. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva (Kasmir, 2019).

$$\text{Debt to Total Assets (DTA)} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

3. **Rasio Profitabilitas (*profitability ratio*)**

Rasio profitabilitas adalah merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba (profit) yang berasal dari pendapatan (eraning) terkait penjualan, aset dan ekuitas. Terdapat 3(tiga) alat ukur rasio profitabilitas, yaitu:

a. **Net Profit Margin**

Margin laba bersih merupakan rasio untuk mengukur prosentase keuntungan yang dihasilkan perusahaan dengan membandingkan antara total laba setelah bunga dan pajak, dengan total penjualan. Dengan kata lain rasio ini menunjukkan pendapatan bersih yang

diperoleh perusahaan atas total penjualannya (Kasmir, 2019).

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%$$

b. **Return On Assets (ROA)**

Merupakan rasio dimana biasanya untuk menilai kemampuan yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam memperoleh laba lewat aktiva (Kasmir, 2019).

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

c. **Return On Equity (ROE)**

Merupakan rasio untuk menilai kinerja perusahaan dengan membandingkan laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri (Kasmir, 2019).

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\%$$

4. **Rasio Aktivitas (*activity ratio*)**

Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai sejauh mana aset-aset (modal) yang dimiliki perusahaan dikelola secara efektif oleh manajemen perusahaan. Terdapat 3(tiga) alat ukur rasio aktivitas, yaitu:

a. **Receivable Turnover (Perputaran Piutang)**

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode (Kasmir, 2019).

$$\text{Receivable Turnover} = \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Rata-rata Piutang}}$$

b. *Inventory Turnover* (Perputaran Persediaan)

Merupakan rasio yang digunakan untuk menilai seberapa efektif dana yang ditanam dalam sediaan (inventory) ini berputar dalam satu periode (Kasmir, 2019).

$$\text{Inventory Turnover} = \frac{\text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Rata-rata Persediaan}}$$

c. *Total Assets Turnover* (Perputaran Aktiva)

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva (Kasmir, 2019).

$$\text{Total Assets Turnover} = \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Total Aktiva}}$$

DAFTAR PUSTAKA

- Gunsu, W. (2022) *Analisis Prediksi Kebangkrutan dengan Menggunakan Model Zmijewski dan Model Grover pada Perusahaan Pertambangan Logam dan Mineral (Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021)*. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.
- Harahap, S.S. (2005) *Teori Akuntansi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir (2019) *Analisis Laporan Keuangan*. Depok: Raja Gafindo Persada.
- OCBC NISP (2023) *Contoh Neraca Keuangan: Arti, Bentuk & Cara Membuatnya*, OCBC. Available at: <https://www.ocbc.id/id/article/2021/05/31/contoh-neraca-keuangan> (Accessed: 11 June 2024).
- Senastri, K. (2024) *Pengertian Laporan Laba Rugi, Jenis, Fungsi, dan 2 Contohnya*, Accurate. Available at: https://accurate.id/akuntansi/laporan-laba-rugi/#Pengertian_Laporan_Laba_Rugi (Accessed: 11 June 2024).
- Sumiarta, M. (2024) *Pentingnya Analisis Keuangan dalam Pengambilan Keputusan*, Universitas Mahakarya Asi. Available at: <https://blog.unmaha.ac.id/pentingnya-analisis-keuangan-dalam-pengambilan-keputusan> (Accessed: 4 June 2024).
- Susilowati, L. (2016) *Mahir Akuntansi Perusahaan Jasa dan Dagang*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Tanjung, A.H. (2007) *Akuntansi Pemerintahan Daerah (Konsep dan Aplikasi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah)*. Bandung: Alfabeta.

BAB 4

PRINSIP-PRINSIP AKUNTANSI KHUSUS

4.1 Pendahuluan

Pendahuluan ini akan menguraikan pentingnya prinsip-prinsip akuntansi khusus dalam berbagai sektor ekonomi dan bagaimana penerapannya dapat berbeda berdasarkan jenis organisasi yang bersangkutan. Prinsip-prinsip ini membantu dalam penyajian laporan keuangan akan akurat serta transparan, cocok dengan karakteristik dan keperluan masing-masing sektor (Ikatan Akuntan Indonesia., 2020).

Dalam berbagai sektor ekonomi, seperti sektor publik, sektor nirlaba, dan sektor swasta, prinsip-prinsip akuntansi khusus diperlukan untuk memastikan laporan keuangan mencerminkan realitas ekonomi yang sesungguhnya (Governmental Accounting Standards Board (GASB), 2017). Misalnya, sektor nirlaba mungkin memiliki aturan yang berbeda dalam pengakuan pendapatan dibandingkan dengan sektor swasta. Demikian juga, sektor publik memerlukan penyesuaian tertentu dalam akuntansi untuk mengakomodasi sifat kegiatan pemerintah dan sumber pendanaannya yang unik.

Prinsip-prinsip akuntansi khusus ini ditetapkan untuk meningkatkan kepercayaan dan transparansi dalam pelaporan keuangan (Edwards & Mellett, 2018). Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, organisasi dapat memberikan informasi yang lebih relevan serta andal pada para pelaksana kepentingan, termasuk kreditur, investor, donor, maupun masyarakat umum .

4.2 Prinsip Akuntansi untuk Sektor Pemerintahan

4.2.1 Pengantar

Sektor pemerintahan memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari sektor lainnya. Akuntansi pemerintah harus

memperhatikan regulasi dan kebijakan yang berlaku untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan., 2010). Pemerintah bertanggung jawab kepada publik untuk penggunaan sumber daya yang diamanahkan pada mereka, sehingga sistem akuntansi yang digunakan harus dapat menyajikan informasi yang sesuai serta andal.

Akuntansi pemerintah harus relevan dengan standar yang telah ditentukan, seperti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Indonesia (Pemerintah Indonesia, 2010), yang mengacu pada standar internasional (International Federation of Accountants., 2021) seperti International Public Sector Accounting Standards (IPSAS). SAP dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, maupun tata kelola dari keuangan yang baik dalam sektor publik.

Standar-standar ini memberikan panduan tentang bagaimana mencatat, mengukur, dan melaporkan transaksi keuangan, serta menyediakan kerangka kerja untuk penyusunan laporan keuangan yang andal (Mardiasmo, 2018). Penggunaan standar yang konsisten membantu dalam membandingkan kinerja keuangan antarperiode dan antarentitas pemerintahan.

4.2.2 Prinsip-Prinsip Dasar

Prinsip-prinsip dasar akuntansi pemerintahan (International Federation of Accountants (IFAC)., 2014) meliputi:

- 1. Dasar AkruaI:** Pencatatan transaksi dari saat terjadinya, tidak pada saat kas itu diterima atau dibayarkan. Pencatatan transaksi dilakukan pada saat terjadinya transaksi, bukan pada saat kas diterima maupun dibayarkan. Prinsip ini bertujuan untuk informasikan gambaran yang cukup akurat mengenai posisi keuangan dan kinerja dari entitas.
- 2. Akuntabilitas Publik:** Laporan keuangan layak bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Laporan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Ini berarti

- laporan harus disusun dengan standar yang memungkinkan masyarakat memahami dan menilai kinerja pemerintah.
3. **Transparansi:** Informasi keuangan harus disajikan secara jelas serta dapat diakses untuk semua pihak berkepentingan. Informasi keuangan harus disajikan secara jelas dan bisa diakses bagi semua pihak berkepentingan. Transparansi membantu meningkatkan akan kepercayaan publik pada pemerintah.
 4. **Kesinambungan:** Menjamin bahwa entitas pemerintah akan beroperasi terus menerus di masa depan. Prinsip ini menjamin bahwa entitas pemerintah akan beroperasi terus menerus di masa depan, sehingga laporan keuangan harus mencerminkan kemampuan entitas untuk terus berfungsi dalam jangka Panjang (Governmental Accounting Standards Board (GASB), 2021).

4.3 Prinsip Akuntansi untuk Sektor Bisnis

4.3.1 Pengantar

Sektor bisnis memiliki tujuan utama untuk menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan harus mencerminkan kinerja keuangan dan posisi keuangan perusahaan dengan benar.

4.3.2 Prinsip-Prinsip Dasar

Prinsip-prinsip dasar dari akuntansi bisnis mencakup :

1. **Entitas Ekonomi:** Perlakuan terpisah antara entitas bisnis dan pemiliknya. Prinsip ini mengharuskan perlakuan terpisah antara entitas bisnis dan pemiliknya. Entitas ekonomi dianggap sebagai satu kesatuan berdiri sendiri serta terpisah dengan pemiliknya maupun entitas lainnya (Kieso et al., 2019).
2. **Kesinambungan Usaha (*Going Concern*):** Asumsi bahwa perusahaan bakal terus beroperasi pada waktu yang tidak terbatas. Hal ini berarti bahwa perusahaan tidak berencana untuk dilikuidasi atau mengurangi skala operasinya secara signifikan dalam waktu dekat (Weygandt et al., 2018).
3. **Dasar Akrual:** Transaksi dicatat disaat terjadinya, bukan pada saat kas diterima maupun dibayarkan. Prinsip ini

memastikan bahwa pendapatan dan beban dicatat dalam periode yang relevan, sehingga suatu laporan keuangan dapat mencerminkan suatu kinerja dari perusahaan yang sebenarnya (C. T. Horngren et al., 2018).

4. **Periode Akuntansi:** Laporan keuangan disusun untuk periode tertentu, biasanya satu tahun. Hal ini dilakukan untuk menyajikan informasi keuangan yang sesuai serta tepat waktu pada pengguna laporan keuangan (Warren et al., 2017a).
5. **Objektivitas:** Pencatatan berdasarkan bukti-bukti yang objektif dan dapat diverifikasi. Prinsip ini mempunyai bertujuan memastikan bahwa suatu laporan keuangan bisa dipercaya dan tidak bias.
6. **Pengakuan Pendapatan dan Beban:** Pengakuan dari pendapatan saat diperoleh maupun beban saat terjadi. Ini berarti bahwa pendapatan serta beban harus dicatat dalam periode yang sesuai pada saat terjadinya, bukan saat kas diterima atau dibayarkan.

4.4 Prinsip Akuntansi untuk Sektor Non-Profit

4.4.1 Pengantar

Sektor non-profit berfokus pada penyediaan layanan sosial dan bukan pada pencarian keuntungan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan harus mencerminkan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan sosial.

4.4.2 Prinsip-Prinsip Dasar

Prinsip-prinsip dasar dari akuntansi sektor non-profit mencakup :

1. **Akuntabilitas:** Laporan keuangan harus menunjukkan bagaimana dana digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Organisasi non-profit harus memberikan laporan keuangan yang lengkap, akurat, serta tepat waktu kepada pemangku kepentingan, termasuk donor, penerima manfaat, dan badan pengawas. Transparansi dalam pelaporan keuangan membantu membangun kepercayaan dan mendukung pengambilan keputusan yang informasional (Financial Accounting Standards Board (FASB), 2016).

2. **Transparansi:** Informasi keuangan harus disajikan secara jelas dan bisa diakses semua pihak berkepentingan (International Federation of Accountants (IFAC), 2019).
3. **Dasar Akruai:** Transaksi dicatat pada saat terjadinya.
4. **Periode Akuntansi:** Laporan keuangan disusun untuk periode tertentu.
5. **Pengakuan Pendapatan dan Beban:** Pengakuan dari pendapatan saat diperoleh maupun beban saat terjadi. Pendapatan dalam organisasi non-profit dapat berasal dari sumbangan, hibah, dan kegiatan penggalangan dana. Pengakuan pendapatan harus dilakukan pada saat penerimaan atau saat terdapat kepastian yang dapat diukur. Beban harus diakui pada saat terjadinya kewajiban atau saat manfaat ekonomi telah diterima (Charities Commission (UK), 2015).
6. **Pemisahan Entitas:** Organisasi non-profit harus memisahkan aktivitas keuangan dan operasionalnya dari kegiatan pribadi anggota atau pemiliknya. Ini memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kinerja organisasi secara akurat dan dapat dipercaya (International Federation of Accountants (IFAC), 2019).
7. **Pelaporan Keuangan:** Laporan keuangan organisasi non-profit biasanya mencakup laporan aktivitas, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Laporan tersebut dirancang untuk membagikan gambaran lengkap tentang kondisi keuangan dan kinerja operasional organisasi (Financial Accounting Standards Board (FASB), 2016).
8. **Restriksi Aset:** Aset dalam organisasi non-profit seringkali dibatasi penggunaannya oleh donor atau pemberi dana. Laporan keuangan harus mencerminkan restriksi ini untuk memberikan gambaran yang jelas tentang sumber daya yang tersedia dan bagaimana mereka dapat digunakan (Charities Commission (UK), 2015).
9. **Pengawasan dan Audit:** Organisasi non-profit biasanya tunduk pada audit eksternal bakal menjamin kepatuhan terhadap standar akuntansi maupun hukum yang berlaku. Audit membantu memastikan maka laporan keuangan lepas dari kesalahan material dan bahwa sumber daya digunakan

sesuai dengan tujuan yang ditetapkan (American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), 2020).

4.5 Jenis-jenis Prinsip Akuntansi Khusus

Prinsip akuntansi khusus merupakan seperangkat aturan dan panduan yang mengatur pencatatan dan pengukuran transaksi keuangan yang kompleks dan tidak biasa dalam suatu entitas bisnis. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan penyajian informasi keuangan yang relevan, andal, dan konsisten, sehingga bisa membantu para pihak yang berkepentingan dalam membuat keputusan yang tepat.

Berikut beberapa jenis prinsip akuntansi khusus yang umum diterapkan:

4.5.1 Prinsip Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap harus dicatat mengacu pada biaya perolehan dan disusutkan sesuai dengan umur manfaatnya. Aset tetap juga harus diuji untuk penurunan nilai secara berkala. Prinsip akuntansi untuk aset tetap mencakup beberapa hal penting, seperti pengakuan, pengukuran, penyusutan, dan pengujian penurunan nilai. Berikut adalah penjelasan lebih detail beserta referensi terkait:

1. Pencatatan Berdasarkan Biaya Perolehan

Aset tetap harus dicatat senilai biaya perolehannya, termasuk semua biaya yang secara langsung bisa diatribusikan untuk mendapatkan aset tersebut dan mempersiapkannya untuk dipergunakan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015).

Referensi: PSAK No. 16 (Revisi 2015) - "Aset Tetap" (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan).

2. Penyusutan Aset Tetap

Aset tetap disusutkan sepanjang umur manfaatnya. Penyusutan dihitung berdasarkan metode yang sistematis dan rasional sesuai dengan pola konsumsi yang bermanfaat ekonomis pada aset tersebut.

Referensi: PSAK No. 16 (Revisi 2015), paragraf 57-66.

3. Pengujian Penurunan Nilai

Aset tetap harus diuji bakal penurunan nilai tiap periode pelaporan. Jika ada indikator bahwa nilai aset dicatat lebih besar dari jumlah yang bisa diperoleh lagi, bahwa aset tersebut dapat diturunkan nilainya (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2013).

Referensi: PSAK No. 48 - "Penurunan Nilai Aset".

4. Penghentian Pengakuan Aset Tetap

Ketika aset dijual atau tidak menghasilkan manfaat ekonomi yang diharapkan dari penggunaan, pengakuan aset dihentikan atau telah dijual.

Referensi: PSAK No. 16 (Revisi 2015), paragraf 73-75.

5. Penyajian dan Pengungkapan

Informasi yang cukup mengenai nilai buku, akumulasi penyusutan, dan estimasi umur manfaat dari aset tetap harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

Referensi: PSAK No. 16 (Revisi 2015), paragraf 78-83.

4.5.2 Prinsip Akuntansi Persediaan

Persediaan merupakan elemen penting pada laporan keuangan perusahaan, yang mencerminkan nilai dari barang yang tersedia untuk bias dijual pada operasi bisnis biasa. Pencatatan persediaan berdasarkan prinsip akuntansi memiliki beberapa pendekatan, di antaranya metode FIFO (*First In, First Out*) dan LIFO (*Last In, First Out*) (Ikatan Akuntan Indonesia, 2019).

- 1. FIFO (*First In, First Out*):** Metode ini menggambarkan bahwa barang pertama kali dibeli ialah barang yang pertama kali untuk dijual. Dalam situasi inflasi, metode FIFO akan membuat dari nilai persediaannya lebih tinggi serta biaya barang yang dijual (COGS) yang lebih rendah, sehingga laba kotor akan lebih tinggi (Weygandt et al., 2020).
- 2. LIFO (*Last In, First Out*):** Metode ini menggambarkan bahwa barang terakhir kali dibeli ialah barang yang pertama kali untuk dijual. Dalam situasi inflasi, sistem LIFO akan membuat dari nilai persediaannya lebih rendah serta biaya barang yang dijual (COGS) yang lebih tinggi, sehingga laba kotor akan lebih rendah (Wild et al., 2020).

Selain itu, persediaan juga harus diuji untuk penurunan nilai tersebut. Penurunan nilai persediaan terjadi pada saat nilai tercatat persediaan melampaui jumlah yang bisa diperoleh kembali (net realizable value). Jika terjadi penurunan nilai, persediaan harus diturunkan ke nilai yang bisa diperoleh kembali, serta kerugian tersebut diakui dalam laporan rugi laba.

4.5.3 Prinsip Akuntansi Investasi

Prinsip akuntansi investasi menetapkan bagaimana entitas mencatat, mengukur, dan mengungkapkan investasi pada laporan keuangan. Prinsip ini bertujuan untuk menggambarkan informasi yang relevan serta andal pada pengguna laporan keuangan. Secara umum, investasi dicatat berdasarkan dua metode utama: biaya perolehan dan nilai wajar (IFRS Foundation., 2024). Pengakuan pendapatan investasi dilakukan saat pendapatan tersebut diperoleh.

1. Biaya Perolehan

Metode biaya perolehan digunakan terutama untuk investasi dimaksud bisa dimiliki dalam jangka panjang, seperti investasi pada entitas asosiasi atau anak perusahaan. Dalam metode ini, investasi dicatat sebesar biaya perolehan awalnya, yang mencakup harga beli ditambah biaya transaksi terkait. Setiap penurunan nilai yang signifikan dan permanen harus diakui sebagai kerugian (Financial Accounting Standards Board (FASB)., 2024).

Contoh:

Misalkan sebuah perusahaan membeli saham anak perusahaan sebesar \$100.000 dan mengeluarkan biaya transaksi sebesar \$2.000. Investasi ini akan dicatat dalam laporan keuangan sebesar \$102.000. Jika di kemudian hari nilai investasi ini turun menjadi \$90.000 karena penurunan nilai yang signifikan, maka perusahaan harus mengakui kerugian penurunan nilai sebesar \$12.000.

2. Nilai Wajar

Metode nilai wajar bias dipergunakan untuk investasi yang dimaksudkan untuk diperdagangkan atau dijual dalam

jangka pendek, seperti saham untuk bisa diperdagangkan pada bursa efek. Investasi ini diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajarnya pada tanggal laporan. Perubahan dari nilai wajar yang diakui pada laporan laba rugi periode berjalan (IFRS Foundation., 2024).

Contoh:

Jika sebuah perusahaan membeli saham sebesar \$50.000, serta di akhir periode akuntansi nilai wajar saham tersebut naik menjadi \$55.000, maka perusahaan akan mengakui keuntungan sebesar \$5.000 dalam laporan rugi laba.

3. Pengakuan Pendapatan Investasi

Pendapatan dari investasi diakui pada saat diperoleh, yaitu ketika hak untuk menerima pendapatan tersebut telah terbentuk. Pendapatan investasi bisa berasal dari berbagai sumber, seperti dividen, bunga, atau capital gain (Financial Accounting Standards Board (FASB)., 2024).

Dividen:

Dividen diakui sebagai pendapatan saat dari hak untuk menerima pembayaran atas dividen sudah ditetapkan oleh entitas yang membagikan dividen.

Bunga:

Pendapatan dari bunga akan diakui berdasarkan sistem suku bunga efektif, yang menyebarkan pendapatan dari bunga selama periode yang sesuai.

Capital Gain:

Capital gain diakui pada saat terjadinya transaksi penjualan investasi yang menghasilkan keuntungan.

4.5.4 Prinsip Akuntansi Piutang Tak Tertagih

Pendahuluan

Piutang ialah salah satu aset penting pada laporan keuangan perusahaan. Piutang itu timbul efek dari penjualan suatu barang maupun jasa secara sistem kredit kepada pelanggan (Kieso et al., 2020). Namun, tidak seluruh piutang bisa tertagih. Oleh sebab itu, perusahaan harus melakukan evaluasi terhadap kemungkinan tidak tertagihnya piutang dan mencadangkan sejumlah dana untuk kerugian piutang. Hal tersebut penting untuk menggambarkan lebih

realistis mengenai nilai aset perusahaan dan untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan memberikan suatu informasi andal serta relevan bagi penggunaannya.

Pengertian Piutang Tak Tertagih

Piutang tak tertagih ialah piutang yang dianggap tidak bisa ditagih lagi sebab pelanggan sudah tidak mampu atau tidak mau membayar (Revsine et al., 2015). Kondisi ini bisa disebabkan oleh kebangkrutan pelanggan, sengketa bisnis, atau alasan lainnya yang membuat pelanggan tidak mampu menyelesaikan kewajibannya.

Prinsip Akuntansi dalam Mencadangkan Piutang Tak Tertagih

1. Pengakuan Kerugian Piutang:

- a. Perusahaan harus mengakui kerugian piutang saat ada bukti yang memadai bahwa piutang tidak akan tertagih (Warren et al., 2017b). Bukti tersebut dapat berupa informasi dari pihak ketiga mengenai kondisi keuangan pelanggan atau pengalaman masa lalu dengan pelanggan tersebut.
- b. Pengakuan kerugian dari piutang dilakukan dengan cara mendebit akun dari Kerugian Piutang serta mengkredit akun dari Cadangan Kerugian Piutang.

2. Metode Estimasi Kerugian Piutang:

- a. **Metode Langsung (*Direct Write-off Method*):** Metode ini mengakui kerugian piutang secara langsung saat dari piutang tersebut dipastikan tidak bisa tertagih (Kieso et al., 2020). Namun, metode ini tidak sesuai dengan prinsip matching dalam akuntansi karena kerugian piutang tidak diakui saat periode yang sama untuk pendapatan terkait.
- b. **Metode Cadangan (*Allowance Method*):** Metode ini lebih sesuai dengan prinsip akuntansi karena mengakui kerugian piutang berdasarkan estimasi kerugian yang mungkin terjadi dalam periode yang sama dengan pendapatan terkait (Revsine et al., 2015). Ada beberapa pendekatan dalam metode cadangan, antara lain:

1) Pendekatan Persentase Penjualan (*Percentage of Sales Method*): Cadangan kerugian piutang dihitung berdasarkan persentase yang ditentukan dari total penjualan kredit selama periode bersangkutan.

2) Pendekatan Analisis Usia Piutang (*Aging of Accounts Receivable Method*): Piutang dikelompokkan berdasarkan usia (lama tidaknya piutang belum dibayar), dan persentase kerugian piutang diterapkan pada setiap kelompok usia untuk menghitung cadangan kerugian piutang.

3. Pelaporan dan Pengungkapan:

- a. Laporan keuangan dapat mengungkapkan suatu kebijakan metoda akuntansi yang digunakan pada mencadangkan kerugian piutang (Warren et al., 2017b). Ini termasuk metode estimasi yang digunakan dan dasar perhitungan persentase atau asumsi lainnya.
- b. Informasi mengenai cadangan kerugian piutang juga dapat diungkapkan pada catatan suatu laporan keuangan, termasuk perubahan pada cadangan selama periode berjalan dan alasan utama perubahan tersebut.

Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi piutang tak tertagih, perusahaan bisa menghasilkan suatu laporan keuangan lebih akurat serta bisa diandalkan, dan memberikan informasi yang lebih baik kepada pemangku kepentingan.

4.5.5 Prinsip Akuntansi Pendapatan

Prinsip akuntansi pendapatan adalah bagian penting dari standar akuntansi yang mengatur bagaimana dan kapan pendapatan harus diakui pada laporan keuangan perusahaan (Financial Accounting Standards Board (FASB), 2014). Prinsip ini memastikan bahwa pendapatan dilaporkan secara konsisten dan tepat waktu, memberikan suatu gambaran akurat mengenai kinerja keuangan dari perusahaan (Scott & O'Brien, 2020). Berikut ini adalah uraian mendalam tentang prinsip akuntansi pendapatan :

Pengakuan Pendapatan

Pengakuan pendapatan ialah proses untuk mencatat semua pendapatan pada laporan keuangan pada saat diperoleh, bukan saat kas diterima (Financial Accounting Standards Board (FASB)., 2014). Hal tersebut berarti pendapatan diakui saat barang maupun jasa sudah diserahkan pada pelanggan, dan bukan ketika pembayaran diterima. Prinsip ini didasarkan pada dua konsep utama dalam akuntansi: basis akrual dan prinsip pengakuan pendapatan.

1. **Basis Akrual:** Basis akrual mengharuskan pendapatan serta beban diakui pada periode terjadinya, terlepas dari kapan kas diterima atau dibayarkan (Kieso et al., 2019). Ini berarti pendapatan diakui pada saat perusahaan memiliki hak untuk menerimanya, yaitu saat barang sudah diserahkan maupun jasa sudah diberikan.
2. **Prinsip Pengakuan Pendapatan:** Menurut prinsip pengakuan pendapatan, pendapatan baru diakui ketika:
 - a. Ada peningkatan dari manfaat ekonomi pada masa depan terkait peningkatan aset maupun penurunan kewajiban yang bisa diukur secara akurat.
 - b. Pendapatan bisa diukur dengan akurat.
 - c. Kemungkinan efek dari manfaat ekonomi yang menyangkut dengan transaksi bisa mengalir ke entitas.

Pengukuran Pendapatan

Pendapatan harus bisa diukur dengan suatu nilai wajar dari imbalan yang diterima maupun bisa diterima (International Accounting Standards Board (IASB)., 2014). Ini berarti bahwa suatu pendapatan harus diukur berdasarkan nilai pasar dari imbalan tersebut, bukan pada jumlah kas yang diterima. Jika imbalan diterima dalam bentuk selain kas, misalnya barang atau jasa, maka pendapatan bisa diukur dengan suatu nilai yang wajar dari imbalan non-kas tersebut.

Contoh Pengakuan Pendapatan

1. **Penjualan Barang:** Pendapatan hasil dari penjualan barang bisa diakui ketika semua kondisi ini terpenuhi:

- a. Perusahaan sudah mengalihkan risiko maupun manfaat dari kepemilikan akan barang cukup signifikan pada pembeli.
 - b. Perusahaan sudah tidak terlibat dalam pengelolaan barang maupun pengendalian barang.
 - c. Jumlah dari pendapatan bisa diukur secara seksama.
 - d. Kemungkinan efek manfaat secara ekonomi yang berkaitan dengan transaksi dapat mengalir ke perusahaan tersebut.
 - e. Biaya yang telah terjadi maupun akan terjadi berhubungan dengan transaksi bisa diukur secara akurat.
- 2. Penjualan Jasa:** Pendapatan hasil dari penjualan jasa dapat diakui dengan mengacu pada tahap penyelesaian transaksi pada tanggal laporan keuangan. Pendapatan diakui berdasarkan hasil yang andal dari jasa yang telah diberikan.

Prinsip-prinsip ini membantu memastikan bahwa laporan keuangan menyampaikan gambaran yang tepat mengenai kinerja keuangan dari perusahaan, pada bagiannya membantu para pengemban kepentingan membuat keputusan yang baik.

4.5.6 Prinsip Akuntansi Beban

1. Pengertian dan Konsep Dasar

Prinsip akuntansi beban adalah salah satu prinsip dasar dalam akuntansi yang mengatur pengakuan beban (*expense*) dalam laporan keuangan (Kieso et al., 2020). Prinsip ini mengemukakan bahwa beban bisa diakui pada periode yang sejajar dengan pendapatan yang dihasilkan dari beban tersebut. Ini dikenal sebagai prinsip penandingan (*matching principle*).

Prinsip ini penting untuk memberikan bayangan yang akurat mengenai kinerja dari keuangan pada suatu entitas selama periode tertentu. Dengan mencocokkan beban dengan pendapatan yang relevan, laporan keuangan dapat menunjukkan laba bersih yang lebih realistis.

2. Implementasi Prinsip Penandingan

a. Beban Langsung:

- 1) Beban langsung adalah sebagai beban yang langsung berhubungan sama pendapatan tertentu. Misalnya, biaya bahan baku dalam produksi barang. Beban ini diakui pada saat produk dijual, bukan saat bahan baku dibeli (C. T. , Horngren et al., 2019).
- 2) Contoh: Jika perusahaan menjual barang pada bulan Desember, biaya beban bahan baku yang dipergunakan buat memproduksi dari barang tertentu juga harus diakui pada bulan Desember, meskipun bahan baku tersebut mungkin dibeli pada bulan sebelumnya.

b. Beban Tidak Langsung:

- 1) Beban tidak langsung ialah biaya beban yang tidak dapat dihubungkan langsung sama pendapatan tertentu tetapi masih perlu diakui dalam periode yang relevan (Warren et al., 2018). Misalnya, biaya penyusutan aset tetap.
- 2) Contoh: Mesin yang digunakan dalam produksi barang mengalami penyusutan. Biaya penyusutan harus diakui dalam laporan keuangan setiap bulan atau tahun sesuai dengan masa manfaat mesin tersebut.

3. Metode Pengakuan Beban

a. Akruai Basis:

- 1) Dalam metode akrual, beban diakui saat terjadinya, bukan pada saat kas tersebut dibayarkan. Ini membantu mencocokkan beban dengan pendapatan yang relevan (Wild et al., 2019).
- 2) Contoh: Gaji karyawan untuk bulan Desember diakui sebagai beban pada bulan Desember, meskipun gaji mungkin baru dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya.

b. Kas Basis:

- 1) Dalam metode kas, beban diakui pada saat kas dibayarkan. Meskipun lebih sederhana, metode ini kurang mencerminkan prinsip penandingan dan lebih jarang digunakan dalam praktik akuntansi komersial.

- 2) Contoh: Biaya listrik yang dibayar pada bulan Januari untuk penggunaan bulan Desember diakui pada bulan Januari.

4. Keuntungan dan Tantangan

Keuntungan:

- a. **Akurasi:** Membantu memberikan gambaran yang lebih akurat tentang laba bersih perusahaan dalam periode tertentu.
- b. **Konsistensi:** Menyediakan cara yang konsisten untuk mengakui beban dan pendapatan, memudahkan analisis maupun perbandingan dari kinerja keuangan pada waktu ke waktu.

Tantangan:

- a. **Kompleksitas:** Memerlukan perhitungan dan pencatatan yang lebih kompleks dibandingkan metode kas.
- b. **Penilaian Subjektif:** Kadang-kadang membutuhkan estimasi dan penilaian subyektif, seperti dalam kasus penyusutan atau provisi untuk kerugian.

Prinsip akuntansi beban, terutama prinsip penandingan, merupakan dasar yang penting dalam praktik akuntansi yang memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan dan kinerja perusahaan secara akurat.

4.5.7 Prinsip Akuntansi Transaksi Berlebihan dan Kekurangan

Prinsip Akuntansi Transaksi Berlebihan dan Kekurangan merujuk pada perlakuan akuntansi terhadap transaksi yang melibatkan kelebihan atau kekurangan, yang harus dicatat dan dijelaskan dengan jelas pada catatan dari laporan keuangan (Financial Accounting Standards Board (FASB), 2020). Berikut ini adalah penjelasan mendalam mengenai prinsip ini beserta referensi yang relevan.

Penjelasan Mendalam

1. **Transaksi Berlebihan (*Overstatement*)** Transaksi berlebihan terjadi ketika suatu elemen laporan keuangan

dicatat dengan nilai yang lebih tinggi daripada yang seharusnya (International Accounting Standards Board (IASB), 2021). Ini dapat terjadi karena beberapa alasan, termasuk kesalahan dalam perhitungan, penilaian yang terlalu optimis, atau bahkan manipulasi data. Contoh transaksi berlebihan adalah ketika aset dicatat dengan nilai yang lebih tinggi daripada nilai wajarnya, pendapatan yang dicatat sebelum diperoleh, atau biaya yang dicatat terlalu rendah.

2. **Transaksi Kekurangan (*Understatement*)** Transaksi kekurangan adalah kebalikan dari transaksi berlebihan, yaitu ketika suatu elemen laporan keuangan dicatat dengan nilai yang lebih rendah daripada yang seharusnya. Hal ini juga bisa disebabkan oleh kesalahan atau manipulasi. Contoh transaksi kekurangan adalah pencatatan kewajiban dengan nilai yang lebih rendah dari nilai sebenarnya atau pendapatan yang tidak diakui sepenuhnya.

Prinsip Pencatatan

Menurut prinsip akuntansi yang berlaku umum, transaksi berlebihan dan kekurangan harus dicatat dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2021). Ini untuk menentukan bahwa suatu laporan keuangan memberikan gambaran yang benar dan wajar mengenai kondisi keuangan dari perusahaan.

1. Pengungkapan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan

- a. **Catatan Atas Laporan Keuangan (*Notes to Financial Statements*)** harus mencakup penjelasan mengenai karakter serta jumlah dari setiap suatu transaksi berlebihan atau kekurangan yang material.
- b. Pengungkapan ini membantu pengguna dari laporan keuangan yang memahami dampak dari transaksi-transaksi ini terhadap laporan keuangan dan membuat keputusan yang lebih baik.

2. Penggunaan Estimasi dan Penilaian yang Wajar

- a. Penilaian dan estimasi yang wajar harus digunakan dalam mencatat transaksi untuk menghindari transaksi berlebihan atau kekurangan.
- b. Auditor memiliki peran penting dalam menilai kewajaran estimasi dan penilaian yang digunakan oleh manajemen (Arens et al., 2018).

3. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi

- a. Standar akuntansi, sebagaimana IFRS (*International Financial Reporting Standards*) maupun GAAP (*Generally Accepted Accounting Principles*), menyampaikan panduan yang jelas tentang bagaimana mencatat dan mengungkapkan transaksi berlebihan dan kekurangan (International Accounting Standards Board (IASB), 2021).
- b. Kepatuhan terhadap standar ini sangat penting untuk memastikan konsistensi dan transparansi dalam pelaporan keuangan.

Contoh Pengungkapan

Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan menemukan bahwa mereka telah mencatat piutang dagang dengan suatu nilai yang tinggi dari suatu nilai yang dapat tertagih, mereka harus menyesuaikan nilai tersebut pada laporan keuangan dan menjelaskan alasannya pada catatan dari laporan keuangan. Hal ini bisa termasuk menjelaskan metode yang digunakan untuk menilai piutang, serta alasan mengapa penilaian sebelumnya tidak akurat.

Dengan memahami dan menerapkan prinsip akuntansi ini, perusahaan bisa memastikan sebuah laporan keuangan mereka menyampaikan gambaran yang akurat dan bisa diandalkan, serta memenuhi persyaratan pengungkapan yang ditetapkan oleh standar akuntansi yang berlaku.

4.5.8 Prinsip Akuntansi Peristiwa Kontijensi

Peristiwa kontijensi dalam akuntansi adalah kejadian atau kondisi yang mungkin terjadi, tetapi keberadaannya hanya dapat dipastikan setelah terjadi maupun tidak terjadi satu peristiwa pada masa depan. Peristiwa ini dapat berdampak pada

laporan keuangan entitas dan perlu diungkapkan jika ada kemungkinan yang cukup besar. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai prinsip akuntansi peristiwa kontinjensi, serta referensi yang relevan.

Pengertian Peristiwa Kontinjensi

Peristiwa kontinjensi bisa berupa:

1. **Kewajiban Kontinjensi:** Potensi kewajiban yang timbul akibat peristiwa masa depan. Contohnya, gugatan hukum yang mungkin mengakibatkan kerugian.
2. **Aset Kontinjensi:** Potensi keuntungan yang mungkin diperoleh akibat peristiwa masa depan, seperti klaim atas asuransi.

Kriteria Pengungkapan

Menurut **Standar Akuntansi Keuangan (SAK)** di Indonesia, khususnya PSAK No. 57 (Revisi 2009) tentang Provisi, Kontinjensi, serta Aset Kontinjensi, peristiwa kontinjensi harus diungkapkan dengan memenuhi dua kriteria berikut:

1. **Kemungkinan Terjadinya:** Ada kemungkinan yang cukup besar bahwa peristiwa masa depan akan terjadi.
2. **Dampak terhadap Kondisi Keuangan:** Peristiwa tersebut akan mempengaruhi kondisi keuangan entitas.

Prosedur Pengungkapan

1. **Deskripsi Peristiwa:** Mengungkapkan sifat dari peristiwa kontinjensi.
2. **Estimasi Dampak Keuangan:** Menyediakan estimasi jumlah yang mungkin terlibat atau, jika tidak dapat diperkirakan secara andal, menyatakan bahwa angka tersebut tidak dapat dihitung.
3. **Keterlibatan Pihak Ketiga:** Menyebutkan pihak ketiga yang terlibat pada peristiwa kontinjensi.

Contoh Pengungkapan

1. **Gugatan Hukum:** “Perusahaan sedang menghadapi gugatan hukum dari mantan karyawan atas pemutusan hubungan kerja. Perkiraan kerugian yang mungkin timbul dari gugatan ini

adalah Rp500 juta, namun hasil akhir dari persidangan belum dapat dipastikan.”

2. **Asuransi:** “Perusahaan telah mengajukan klaim asuransi atas kerusakan akibat kebakaran di gudang. Klaim tersebut diperkirakan dapat menghasilkan dana asuransi sebesar Rp1 miliar, tetapi proses klaim masih dalam tahap verifikasi.”

Referensi

Untuk mendalami lebih lanjut mengenai prinsip ini, Anda bisa merujuk pada beberapa referensi berikut:

1. **PSAK No. 57 (Revisi 2009)**, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia.
2. **Financial Accounting Standards Board (FASB) Statement No. 5** – "Accounting for Contingencies" (FASB, 1975).
3. **International Accounting Standard (IAS) 37** – "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" (IASB, 1998).

Referensi tersebut memberikan pedoman dan detail tentang bagaimana peristiwa kontijensi harus diakui, diukur, dan diungkapkan dalam laporan keuangan.

Dengan mengikuti pedoman ini, entitas bisa memastikan suatu laporan keuangan menyajikan informasi yang transparan serta akurat mengenai peristiwa kontijensi yang ada, memungkinkan pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang informasional.

4.5.9 Prinsip Akuntansi Perubahan Kebijakan Akuntansi

1. Definisi dan Dasar Hukum

Perubahan kebijakan akuntansi merujuk pada keputusan entitas untuk mengadopsi prinsip akuntansi yang tidak sama dari yang sebelumnya digunakan pada penyusunan laporan keuangan. Kebijakan dari akuntansi mencakup prinsip-prinsip, basis, patokan, aturan, maupun praktik khusus yang digunakan sama entitas pada menyusun begitupun menyajikan suatu laporan keuangannya. Perubahan kebijakan dari akuntansi biasanya dilakukan

untuk memberikan informasi yang makin relevan serta andal kepada pengguna laporan keuangan tersebut.

Peraturan tentang perubahan dari kebijakan akuntansi dapat ditemukan dalam berbagai standar pada akuntansi internasional semacam *International Financial Reporting Standards* (IFRS), khususnya pada IAS 8 "*Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*". Di Indonesia, aturan ini juga diatur pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang mengadopsi dari IFRS.

2. **Pengungkapan Perubahan Kebijakan Akuntansi**

Ketika terjadi perubahan dari kebijakan akuntansi, entitas harus dapat mengungkapkan hal-hal sebagai berikut pada sebuah laporan keuangan:

- a. **Alasan Perubahan:** Entitas harus menjelaskan alasan mengapa kebijakan tersebut diubah dan mengapa kebijakan baru dianggap lebih tepat.
- b. **Sifat Perubahan:** Penjelasan tentang perubahan yang dilakukan pada kebijakan akuntansi.
- c. **Jumlah Penyesuaian:** Informasi kuantitatif tentang efek kumulatif dari perubahan kebijakan pada periode laporan sebelumnya.
- d. **Periode Akomodasi:** Informasi tentang periode-periode laporan sebelumnya yang terkena dampak dari perubahan tersebut.

3. **Penyesuaian Laporan Keuangan**

Efek kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi harus disesuaikan dalam laporan keuangan periode sebelumnya, yang disebut juga sebagai **restatement**. Penyesuaian ini dilakukan dengan cara mengubah angka-angka komparatif dalam laporan keuangan untuk mencerminkan kebijakan baru seolah-olah dari kebijakan dimaksud selalu menerapkan dari awal.

Jika perubahan dari kebijakan tidak praktis untuk menerapkan secara retrospektif, entitas harus mengungkapkan alasan mengapa perubahan retrospektif tidak dapat dilakukan dan bagaimana kebijakan baru diterapkan secara prospektif.

4. Contoh Kasus

Sebagai gambaran, jika suatu perusahaan mengubah kebijakan penyusutan dari metode garis lurus ke metode saldo menurun ganda, perusahaan harus mengungkapkan:

- a. Alasan perubahan, misalnya karena metode saldo menurun ganda lebih mencerminkan pola penggunaan aset.
- b. Sifat perubahan, yaitu metode penyusutan yang digunakan.
- c. Efek kumulatif pada periode sebelumnya, misalnya dengan menunjukkan dampaknya terhadap laba bersih dan aset tetap.
- d. Penyesuaian pada laporan keuangan periode sebelumnya untuk mencerminkan perubahan tersebut.

4.6 Kesimpulan

Prinsip-prinsip akuntansi khusus memainkan peranan krusial dalam menjamin bahwa laporan keuangan suatu entitas dapat diandalkan serta memberikan perkiraan yang akurat mengenai kondisi keuangan entitas tersebut. Penerapan prinsip-prinsip ini memang bervariasi tergantung pada sektor yang bersangkutan, namun tujuannya tetap seragam, yaitu untuk peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan keandalan informasi keuangan.

Dalam rangka memenuhi tujuan peningkatan akuntabilitas, transparansi, serta keandalan informasi keuangan, entitas perlu menerapkan prinsip-prinsip akuntansi khusus ini secara konsisten. Penerapan yang tepat dari prinsip-prinsip tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas laporan keuangan tetapi juga membangun kepercayaan para pengguna dari laporan keuangan, baik eksternal maupun internal.

Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi ini, entitas bisa memastikan dari laporan keuangannya memenuhi standar yang diharapkan dan bisa diandalkan oleh para pemangku kepentingan. Hal ini juga bisa membantu pada pengambilan suatu keputusan yang lebih baik dan efisien.

Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan bisa memberikan suatu informasi yang akurat serta bermanfaat untuk suatu pengambilan keputusan ekonomi yang jauh lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). (2020). *Audit and Accounting Guide: Not-for-Profit Entities*. AICPA.
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2018). *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach*. (16th ed.). Pearson.
- Charities Commission (UK). (2015). *Accounting and Reporting by Charities: Statement of Recommended Practice (SORP) FRS 102*. SORP FRS 102.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. (2013). *PERNYATAAN Standar Akuntansi Keuangan PENURUNAN NILAI ASET PSAK 48*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Edwards, J. R., & Mellett, H. (2018). *Public Sector Accounting and Accountability*. Routledge.
- Financial Accounting Standards Board (FASB). (2014). *Revenue from Contracts with Customers (Topic 606)*. FASB.
- Financial Accounting Standards Board (FASB). (2016). *FASB Accounting Standards Codification (ASC) Topic 958, Not-for-Profit Entities*. FASB ASC 958.
- Financial Accounting Standards Board (FASB). (2020). *Conceptual Framework for Financial Reporting*. FASB.
- Financial Accounting Standards Board (FASB). (2024). *Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)*. FASB.org.
- Governmental Accounting Standards Board (GASB). (2017). *Governmental Accounting Standards*. CT: GASB.
- Governmental Accounting Standards Board (GASB). (2021). *Codification of Governmental Accounting and Financial Reporting Standards*. GASB Codification.
- Horngren, C. T., Harrison, W. T., & Oliver, M. S. (2018). *Financial & Managerial Accounting*. Pearson.
- Horngren, C. T., Harrison, W. T., & Oliver, M. S. (2019). *Financial & Managerial Accounting* (6th ed.). Pearson Education.
- IFRS Foundation. (2024). *International Financial Reporting Standards (IFRS)*. IFRS.org.

- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). *Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 16 (Revisi 2015) Aset Tetap*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2019). *Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2021). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1: Penyajian Laporan Keuangan*. IAI.
- International Accounting Standards Board (IASB). (2014). *IFRS 15: Revenue from Contracts with Customers*. IFRS Foundation.
- International Accounting Standards Board (IASB). (2021). *IFRS 15: Revenue from Contracts with Customers*. IASB.
- International Federation of Accountants. (2021). *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)*. <https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/international-public-sector-accounting-standards>
- International Federation of Accountants (IFAC). (2014). *Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements*. IFAC Handbook.
- International Federation of Accountants (IFAC). (2019). *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)*. IFAC.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2019). *Intermediate Accounting*. John Wiley & Sons.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2020). *Intermediate Accounting* (17th ed.). John Wiley & Sons.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Pemerintah Indonesia. (2010). *Standar Akuntansi Pemerintahan*. <http://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/127076/pp-no-71-tahun-2010>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan., Pemerintah Republik Indonesia (2010).

- Revsine, L., Collins, D. W., Johnson, W. B., Mittelstaedt, H. F., & Soffer, L. C. (2015). *Financial Reporting and Analysis* (6th ed.). McGraw-Hill Education.
- Scott, W. R. , & O'Brien, P. C. (2020). *Financial Accounting Theory*. Pearson Canada.
- Warren, C. S., Reeve, J. M., & Duchac, J. (2017a). *Accounting*. Cengage Learning.
- Warren, C. S., Reeve, J. M., & Duchac, J. (2017b). *Financial & Managerial Accounting* (14th ed.). South-Western Cengage Learning.
- Warren, C. S., Reeve, J. M., & Duchac, J. (2018). *Accounting* (27th ed.). Cengage Learning.
- Weygandt, J. J., Kieso, D. E., & Kimmel, P. D. (2020). *Accounting Principles* (14th ed.). John Wiley & Sons.
- Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. (2018). *Financial Accounting*. John Wiley & Sons.
- Wild, J. J., Shaw, K. W., & Chiappetta, B. (2019). *Fundamental Accounting Principles* (24th ed.). McGraw-Hill Education.
- Wild, J. J., Shaw, K. W., & Chiappetta, B. (2020). *Fundamental Accounting Principles* (24th ed.). McGraw-Hill Education.

BAB 5

TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL DALAM AKUNTANSI

5.1 Pengertian Tanggung Jawab Profesional dalam Akuntansi

Dalam dunia akuntansi (Angotti dkk., 2024), tanggung jawab profesional adalah prinsip fundamental yang mengharuskan akuntan menjalankan tugas dengan standar etika yang tinggi. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban akuntan untuk bertindak dengan integritas, artinya jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam setiap aspek pekerjaannya. Integritas menjadi dasar dari kepercayaan yang diberikan oleh klien, investor, dan publik terhadap profesi akuntansi. Tanpa integritas, profesi akuntansi akan kehilangan legitimasi, dan informasi keuangan yang disediakan oleh akuntan tidak lagi dapat dipercaya oleh para pemangku kepentingan.

Objektivitas merupakan elemen penting lain dari tanggung jawab profesional. Akuntan diharapkan untuk memberikan penilaian yang bebas dari pengaruh pribadi, tekanan eksternal, atau konflik kepentingan yang dapat mengaburkan keputusan. Objektivitas ini menjamin bahwa laporan keuangan dan informasi lain yang disediakan oleh akuntan adalah representasi yang akurat dari kondisi keuangan suatu entitas. Dengan demikian, akuntan harus selalu menjaga sikap profesional dan netral, tidak membiarkan pendapat atau tekanan dari pihak lain mempengaruhi penilaian dan rekomendasi. Selain integritas dan objektivitas, tanggung jawab profesional juga mencakup kehati-hatian dalam setiap tindakan (Campos-García, 2022). Akuntan harus menjalankan tugas dengan ketelitian dan ketepatan, memastikan bahwa semua informasi yang dilaporkan adalah akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Ini berarti akuntan harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip akuntansi dan tetap memperbarui pengetahuan untuk mengatasi perubahan

dalam standar dan regulasi akuntansi. Kehati-hatian ini membantu mengurangi risiko kesalahan yang dapat mengakibatkan kerugian finansial atau reputasi bagi klien dan akuntan itu sendiri.

Komitmen untuk menjaga kerahasiaan informasi klien adalah pilar lain dari tanggung jawab profesional dalam akuntansi. Akuntan sering kali memiliki akses ke data sensitif, termasuk informasi keuangan dan bisnis strategis yang tidak boleh diungkapkan tanpa izin. Menjaga kerahasiaan ini adalah esensial untuk melindungi privasi dan kepentingan klien. Selain itu, menjaga kerahasiaan juga merupakan cara untuk mempertahankan integritas profesi akuntansi (Morrison dkk., 2024), karena pelanggaran terhadap prinsip ini dapat merusak kepercayaan klien dan reputasi profesional akuntan.

5.2 Prinsip-Prinsip Etika dalam Akuntansi

Prinsip-prinsip etika merupakan dasar bagi setiap tindakan yang diambil oleh akuntan dalam menjalankan tugas (Ang & Wickramasinghe, 2023). Prinsip pertama yang menjadi landasan etika akuntansi adalah integritas. Integritas dalam akuntansi tidak hanya berarti jujur dalam pelaporan keuangan, tetapi juga mencakup penghindaran konflik kepentingan dan perilaku yang dapat merugikan orang lain. Seorang akuntan yang berintegritas harus memiliki komitmen terhadap kebenaran dan keadilan, memastikan bahwa semua informasi yang dilaporkan adalah benar dan tidak dimanipulasi untuk keuntungan pribadi atau organisasi tertentu.

Objektivitas adalah prinsip kedua yang sangat penting dalam etika akuntansi. Prinsip ini menekankan pentingnya ketidakberpihakan dan independen akuntan dalam melakukan tugasnya. Objektivitas mengharuskan akuntan untuk memberikan penilaian yang didasarkan pada fakta dan bukti yang ada, tanpa dipengaruhi oleh tekanan dari pihak lain. Dalam praktiknya, akuntan harus menghindari situasi di mana keputusan dapat dipengaruhi oleh hubungan pribadi atau kepentingan finansial, karena hal ini dapat mengarah pada penyimpangan informasi dan keputusan yang tidak adil. Prinsip etika ketiga adalah kompetensi profesional dan kehati-hatian. Seorang akuntan harus memiliki

pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk melaksanakan tugas dengan benar. Kompetensi ini harus dipertahankan dan ditingkatkan melalui pendidikan berkelanjutan dan pelatihan profesional. Kehati-hatian berarti bahwa akuntan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan standar tertinggi. harus teliti dalam mengumpulkan, memeriksa, dan melaporkan data keuangan untuk menghindari kesalahan yang dapat merugikan klien atau pihak terkait lainnya (Adams dkk., 2023).

Kerahasiaan adalah prinsip etika yang tidak boleh diabaikan dalam profesi akuntansi. Akuntan memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama menjalankan tugas. Prinsip ini penting untuk melindungi hak-hak klien dan untuk mencegah penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan klien atau pihak lain. Mengungkapkan informasi tanpa izin yang sah atau memanfaatkan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi adalah pelanggaran serius terhadap prinsip etika dan dapat mengakibatkan sanksi hukum serta kerugian reputasi bagi akuntan (Abed dkk., 2022).

5.3 Kerahasiaan Informasi dalam Praktik Akuntansi

Menjaga kerahasiaan informasi adalah salah satu tanggung jawab utama seorang akuntan dalam praktik profesionalnya. Informasi yang diakses oleh akuntan sering kali bersifat rahasia dan dapat mencakup rincian keuangan, strategi bisnis, dan data pribadi karyawan. Pelanggaran terhadap kerahasiaan informasi ini dapat mengakibatkan konsekuensi serius, termasuk kerugian finansial bagi klien dan kehilangan kepercayaan terhadap profesi akuntansi secara umum. Oleh karena itu, akuntan harus menerapkan langkah-langkah yang ketat untuk melindungi data yang dikelola. Seorang akuntan harus selalu meminta izin yang sah sebelum mengungkapkan informasi apapun kepada pihak ketiga, kecuali jika ada kewajiban hukum yang mengharuskan melakukannya. Dalam situasi di mana akuntan merasa bahwa pengungkapan informasi adalah perlu untuk mencegah tindakan ilegal atau untuk melindungi kepentingan publik, harus mengikuti prosedur yang ditetapkan dan

memastikan bahwa pengungkapan tersebut dilakukan secara sah. Hal ini membantu menjaga keseimbangan antara kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dan tanggung jawab untuk bertindak demi kepentingan umum (Benedetti dkk., 2023).

Dalam era digital saat ini, tantangan untuk menjaga kerahasiaan informasi semakin meningkat. Kemajuan teknologi membawa risiko baru seperti serangan siber, pencurian data, dan kebocoran informasi. Akuntan harus memastikan bahwa sistem keamanan informasi yang gunakan cukup kuat untuk melindungi data dari ancaman ini. Selain itu, pelatihan keamanan informasi secara berkala bagi akuntan dan staf juga penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami tanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan data. Kerahasiaan juga berperan penting dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan antara akuntan dan klien (Benedetti dkk., 2023). Ketika klien yakin bahwa informasi akan dijaga dengan aman, lebih cenderung memberikan data yang lengkap dan akurat, yang pada gilirannya memungkinkan akuntan untuk memberikan layanan yang lebih baik dan lebih andal. Dengan demikian, menjaga kerahasiaan informasi bukan hanya sebuah kewajiban hukum dan etika, tetapi juga strategi bisnis yang penting untuk mempertahankan hubungan jangka panjang yang positif dengan klien.

5.4 Tanggung Jawab terhadap Pemangku Kepentingan

Akuntan memiliki tanggung jawab yang luas tidak hanya kepada klien tetapi juga kepada berbagai pemangku kepentingan lainnya (Abed dkk., 2022). Pemangku kepentingan ini termasuk pemegang saham, pemerintah, investor, dan masyarakat umum. Tanggung jawab terhadap pemegang saham mengharuskan akuntan untuk menyediakan laporan keuangan yang akurat dan transparan, yang dapat digunakan oleh pemegang saham untuk membuat keputusan investasi yang tepat. Kegagalan dalam menyediakan informasi yang akurat dapat mengakibatkan keputusan yang salah dan kehilangan kepercayaan dari pemegang saham.

Garis tanggung jawab juga diperluas kepada pemerintah dan regulator, di mana akuntan harus memastikan bahwa semua pelaporan keuangan dan pajak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini termasuk kewajiban untuk melaporkan penghasilan, membayar pajak, dan mematuhi peraturan akuntansi yang diterapkan oleh otoritas setempat. Ketidakpatuhan terhadap peraturan ini dapat mengakibatkan denda, sanksi hukum, atau kerugian reputasi bagi perusahaan dan akuntan itu sendiri. Investor (Aibar-Guzmán dkk., 2023), sebagai salah satu pemangku kepentingan utama, sangat bergantung pada keakuratan dan kredibilitas laporan keuangan untuk menilai kesehatan keuangan dan prospek masa depan suatu perusahaan. Akuntan harus memastikan bahwa informasi yang disediakan tidak hanya memenuhi standar akuntansi yang diterima, tetapi juga dapat dipahami dan diinterpretasikan dengan benar oleh investor. Tanggung jawab ini mencakup upaya untuk mengurangi kompleksitas laporan keuangan tanpa mengorbankan kualitas informasi yang disajikan.

Selain itu, akuntan juga memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat umum. Informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan dan pasar modal. Akuntan, dengan demikian, berperan dalam mendukung stabilitas ekonomi dan mencegah penipuan serta disinformasi yang dapat merugikan masyarakat luas. Dengan menjalankan tanggung jawab ini, akuntan tidak hanya melindungi kepentingan individu atau organisasi tertentu tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi dan sosial yang lebih luas (Aruga, 2024).

5.5 Tantangan dalam Mempertahankan Tanggung Jawab Profesional

Meskipun prinsip-prinsip etika dalam akuntansi sudah jelas, para akuntan sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam upaya untuk mempertahankan tanggung jawab profesional. Salah satu tantangan utama adalah tekanan dari manajemen perusahaan. Dalam upaya untuk menampilkan performa keuangan yang lebih baik, manajemen mungkin meminta akuntan untuk memanipulasi

laporan keuangan atau mengubah angka tertentu. Permintaan semacam ini, meskipun melanggar prinsip etika dan profesionalisme, dapat muncul sebagai hasil dari tekanan untuk mencapai target keuangan atau memenuhi ekspektasi pasar (Abakah dkk., 2023).

Selain tekanan dari manajemen, akuntan juga menghadapi tantangan dalam menjaga independensi dan objektivitas. Independen seorang akuntan bisa terancam ketika memiliki hubungan pribadi atau finansial dengan klien, atau ketika insentif finansial menjadi prioritas utama. Dalam situasi ini, akuntan harus memiliki keberanian moral untuk menolak permintaan yang bertentangan dengan etika profesi. Menolak permintaan yang melanggar etika membutuhkan keberanian dan komitmen yang kuat terhadap standar profesionalisme, meskipun keputusan ini mungkin berdampak pada karir atau hubungan profesional (Paletta dkk., 2021).

Kemajuan teknologi telah membawa tantangan baru terkait dengan kerahasiaan dan keamanan informasi. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital, ancaman terhadap keamanan siber juga meningkat. Akuntan harus melindungi data sensitif dari akses tidak sah, kebocoran data, atau serangan siber yang dapat merusak integritas dan kerahasiaan informasi (Balch dkk., 2020). Selain itu, pelanggaran data dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan reputasi yang serius, baik bagi akuntan maupun bagi organisasi yang wakili. Untuk menghadapi tantangan-tantangan ini, akuntan harus selalu waspada dan berkomitmen untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi ancaman dan dilema etika yang mungkin muncul. Mengikuti pelatihan yang relevan, berpartisipasi dalam diskusi profesional, dan memahami perkembangan terbaru dalam regulasi dan teknologi adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk memperkuat kemampuan dalam menghadapi tantangan ini. Dengan demikian, akuntan dapat memastikan bahwa tetap memenuhi tanggung jawab profesional dengan cara yang etis dan efektif.

5.6 Konflik Kepentingan dalam Profesi Akuntansi

Konflik kepentingan adalah salah satu isu paling signifikan yang dapat mempengaruhi objektivitas dan integritas seorang akuntan. Konflik ini muncul ketika seorang akuntan memiliki kepentingan pribadi, seperti kepemilikan saham atau hubungan keluarga, yang dapat mempengaruhi penilaian profesional. Misalnya, jika seorang akuntan memiliki saham di perusahaan yang audit, mungkin cenderung untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih menguntungkan, meskipun hal itu tidak akurat. Situasi semacam ini dapat merusak kepercayaan publik dan investor terhadap laporan keuangan (Aftabi dkk., 2023).

Untuk mengatasi konflik kepentingan, akuntan harus proaktif dalam mengidentifikasi dan mengungkapkan potensi konflik sebelum mempengaruhi penilaian profesional. Transparansi adalah kunci dalam situasi ini; akuntan harus secara terbuka mengungkapkan kepentingan pribadi kepada pihak terkait, termasuk manajemen (Allakulov dkk., 2023) perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan mengungkapkan konflik tersebut, akuntan memberikan kesempatan bagi organisasi untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghindari bias dalam laporan keuangan. Langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil termasuk penarikan diri dari tugas tertentu yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Misalnya, seorang akuntan yang memiliki hubungan dekat dengan manajemen perusahaan mungkin perlu menarik diri dari audit untuk menjaga independensi dan objektivitas. Selain itu, banyak perusahaan dan organisasi memiliki kebijakan internal yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mengelola konflik kepentingan, sehingga membantu akuntan dalam mengambil keputusan yang tepat.

Pentingnya menghindari konflik kepentingan tidak bisa diremehkan, karena dampak dari konflik yang tidak dikelola dengan baik bisa sangat merugikan. Tidak hanya dapat mengurangi kepercayaan terhadap individu akuntan, tetapi juga dapat merusak reputasi organisasi dan profesi akuntansi secara keseluruhan. Oleh karena itu, akuntan harus selalu berpegang pada prinsip-prinsip etika yang ketat dan menjaga integritas dalam menghadapi situasi konflik kepentingan (Herdt & Jonkman, 2023).

5.7 Peran Pendidikan dalam Memperkuat Tanggung Jawab Profesional

Pendidikan memainkan peran krusial dalam memperkuat tanggung jawab profesional akuntan (Aidi dkk., 2022). Melalui pendidikan formal, akuntan memperoleh pengetahuan dasar tentang prinsip-prinsip akuntansi, hukum, dan etika yang akan membimbing dalam karir profesional. Pendidikan ini tidak hanya mencakup pemahaman tentang prosedur teknis, tetapi juga melibatkan pengembangan sikap profesional dan nilai-nilai etika yang penting dalam praktik sehari-hari. Akuntan yang terdidik dengan baik cenderung lebih siap menghadapi situasi kompleks dan membuat keputusan yang tepat. Pelatihan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa akuntan tetap up-to-date dengan perkembangan terbaru dalam standar akuntansi, peraturan, dan teknologi. Dunia bisnis terus berubah, dengan regulasi baru dan inovasi teknologi yang dapat mempengaruhi cara akuntan bekerja. Melalui pelatihan berkelanjutan, akuntan dapat menyesuaikan keterampilan dengan kebutuhan pasar yang berkembang dan tetap kompeten dalam menyediakan layanan yang relevan dan efektif bagi klien.

Selain pelatihan teknis, pendidikan etika menjadi komponen penting dalam memperkuat tanggung jawab profesional. Pelatihan etika membantu akuntan untuk memahami dan menangani dilema etika yang mungkin hadapi selama karir. Ini termasuk skenario tentang konflik kepentingan, tekanan untuk memanipulasi laporan keuangan, dan tantangan dalam menjaga kerahasiaan informasi. Dengan pemahaman yang kuat tentang etika profesional, akuntan dapat membuat keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan standar profesionalisme (Ataullah dkk., 2022). Banyak organisasi profesional menawarkan program sertifikasi dan pelatihan berkelanjutan yang diakui secara internasional, seperti CPA (Certified Public Accountant) dan ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Program-program ini memberikan akuntan akses ke sumber daya pendidikan yang luas dan komunitas profesional yang dapat mendukung perkembangan karir. Dengan berpartisipasi dalam program ini, akuntan tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis, tetapi juga menunjukkan

komitmen terhadap standar etika dan profesional yang tinggi (Chidkk., 2022).

5.8 Pentingnya Sertifikasi dan Akreditasi

Sertifikasi dan akreditasi profesional, seperti CPA (*Certified Public Accountant*) atau CA (*Chartered Accountant*), memainkan peran penting dalam meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap seorang akuntan. Proses sertifikasi biasanya mencakup ujian yang ketat dan persyaratan pendidikan yang harus dipenuhi oleh kandidat. Sertifikasi ini tidak hanya mengukur pengetahuan dan keterampilan teknis seorang akuntan tetapi juga menilai pemahaman tentang etika dan tanggung jawab profesional, memastikan bahwa hanya individu yang memenuhi standar tinggi yang dapat berpraktik sebagai akuntan profesional (Jellema dkk., 2022).

Proses sertifikasi sering kali melibatkan pelatihan intensif dan ujian yang dirancang untuk menguji pemahaman kandidat tentang prinsip akuntansi, pelaporan keuangan, dan etika. Kandidat harus menunjukkan kompetensi dalam berbagai bidang, termasuk auditing, perpajakan, dan manajemen keuangan. Ujian ini memastikan bahwa hanya yang benar-benar kompeten yang dapat diberikan sertifikasi, yang pada gilirannya meningkatkan standar profesionalisme dalam industri akuntansi. Selain itu, sertifikasi memberikan akuntan akses ke jaringan profesional yang luas, yang dapat menjadi sumber daya berharga untuk pembelajaran berkelanjutan dan dukungan karir. Banyak badan sertifikasi menawarkan konferensi, seminar, dan kursus pelatihan yang dirancang untuk membantu anggotanya tetap up-to-date dengan perkembangan terbaru dalam akuntansi dan teknologi. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan ini, akuntan dapat memperluas pengetahuan, berbagi praktik terbaik, dan meningkatkan kualitas layanan (A. Ahmad dkk., 2023).

Memiliki sertifikasi juga menunjukkan komitmen akuntan terhadap pengembangan profesional yang berkelanjutan. Sertifikasi sering kali mengharuskan akuntan untuk mengikuti program pendidikan berkelanjutan untuk mempertahankan status. Ini berarti akuntan yang tersertifikasi secara konsisten memperbarui

pengetahuan dan keterampilan, memastikan bahwa tetap kompeten dalam menghadapi tantangan baru dalam industri akuntansi yang terus berkembang. Hal ini tidak hanya melindungi klien dari risiko kesalahan tetapi juga memperkuat reputasi profesi akuntansi secara keseluruhan. Pengambilan keputusan etis adalah inti dari tanggung jawab profesional dalam akuntansi (Abu Elbeh, 2024). Akuntan sering kali berada di garis depan pengambilan keputusan keuangan yang memiliki implikasi luas, tidak hanya untuk klien tetapi juga untuk pemangku kepentingan lainnya, termasuk investor, pemerintah, dan masyarakat umum. Setiap keputusan yang diambil oleh akuntan harus diukur terhadap standar etika yang ketat, memastikan bahwa tindakan tidak hanya sah secara hukum tetapi juga bermoral dan adil. Etika dalam pengambilan keputusan mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, transparansi, keadilan, dan pertimbangan terhadap dampak jangka panjang dari keputusan tersebut.

Saat menghadapi dilema etika, akuntan dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan antara kepentingan klien, kepatuhan terhadap hukum, dan tanggung jawab moral. Misalnya, akuntan mungkin harus memutuskan apakah akan melaporkan praktik bisnis tertentu yang dapat merugikan pihak lain, meskipun klien mungkin menekan untuk menutupi informasi tersebut. Dalam situasi seperti ini, akuntan perlu melakukan penilaian yang cermat terhadap konsekuensi potensial dari setiap pilihan, baik dari segi etika maupun dampak terhadap reputasi profesional. Menjaga integritas dan kepercayaan adalah kunci dalam profesi ini, dan keputusan yang tidak etis dapat merusak reputasi akuntan dan kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi secara keseluruhan (Adela dkk., 2024).

Untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang etis, akuntan sering kali dapat melibatkan komite etika atau dewan penasihat yang ada dalam organisasi. Komite ini biasanya terdiri dari individu yang memiliki pengetahuan mendalam tentang prinsip etika dan hukum yang relevan. Dengan melibatkan komite etika, akuntan dapat memperoleh panduan yang obyektif dan dukungan dalam menavigasi situasi yang kompleks. Komite ini dapat membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh

akuntan tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga benar secara moral dan etis, dengan mempertimbangkan semua aspek dan dampak dari keputusan tersebut. Selain komite etika, akuntan juga dapat memanfaatkan pedoman dari badan pengawas profesional yang menyediakan kode etik dan standar perilaku. Organisasi seperti *Institute of Management Accountants* (IMA) dan *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) memberikan pedoman etika yang dirancang untuk membantu akuntan dalam menghadapi dilema etika. Dengan merujuk pada pedoman ini, akuntan dapat memastikan bahwa tindakan sesuai dengan praktik terbaik dalam industri, memperkuat justifikasi keputusan, dan melindungi diri dari potensi tuduhan ketidakprofesionalan atau pelanggaran etika (Baabdullah, 2024).

Dokumentasi adalah alat penting lainnya dalam pengambilan keputusan etis. Akuntan harus mencatat proses pengambilan keputusan, termasuk pertimbangan dan alasan di balik setiap keputusan yang dibuat. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti bahwa akuntan telah mempertimbangkan semua faktor yang relevan dan telah berupaya untuk bertindak sesuai dengan prinsip etika yang berlaku. Selain sebagai bukti, catatan ini juga berfungsi sebagai sumber pembelajaran bagi akuntan lain dalam organisasi, mendorong transparansi dan memperkuat budaya etika yang kuat di dalam perusahaan. Akhirnya, pelatihan berkelanjutan dalam etika profesional merupakan bagian penting dari pengembangan akuntan yang mampu membuat keputusan etis. Melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, akuntan dapat mengembangkan sensitivitas terhadap isu-isu etika dan meningkatkan keterampilan dalam menghadapi dilema yang rumit. Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan akuntan tentang standar dan regulasi yang berlaku tetapi juga membangun karakter moral yang kuat, yang penting untuk menjaga kepercayaan dan integritas dalam profesi akuntansi. Dengan pendekatan yang berkomitmen terhadap etika, akuntan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keadilan dan transparansi dalam dunia bisnis (Abrantes & Ström, 2023).

5.9 Kesimpulan dan Implikasi untuk Profesi Akuntansi

Memahami dan menerapkan tanggung jawab profesional adalah esensial bagi keberhasilan dan keberlanjutan profesi akuntansi. Tanggung jawab ini mencakup komitmen akuntan terhadap prinsip-prinsip integritas, objektivitas, dan kompetensi profesional (De la Puente dkk., 2003). Akuntan yang memegang teguh prinsip-prinsip ini tidak hanya melindungi kepentingan klien tetapi juga berperan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi secara keseluruhan. Dalam dunia yang semakin kompleks dan cepat berubah, di mana tekanan untuk mencapai hasil jangka pendek sering kali menggoda individu untuk mengabaikan etika, tanggung jawab profesional menjadi landasan yang penting untuk memastikan keberlanjutan dan kredibilitas profesi ini.

Dalam konteks globalisasi dan kemajuan teknologi, tantangan yang dihadapi oleh akuntan menjadi semakin kompleks dan beragam. Globalisasi membawa lebih banyak interaksi lintas negara, yang berarti akuntan harus memahami berbagai standar akuntansi internasional dan regulasi yang berbeda di setiap negara. Sementara itu, teknologi menawarkan alat baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pelaporan keuangan, namun juga membawa risiko keamanan siber dan etika baru yang perlu dikelola dengan hati-hati. Oleh karena itu, akuntan harus secara terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapi risiko etika dan teknis yang mungkin muncul (Ahmed, 2023).

Investasi dalam pendidikan berkelanjutan, pelatihan, dan sertifikasi adalah strategi yang efektif untuk memastikan bahwa akuntan tetap kompeten dan siap menghadapi perubahan yang terjadi. Pendidikan berkelanjutan membantu akuntan memperbarui pengetahuan tentang perkembangan terbaru dalam standar akuntansi, teknologi, dan hukum perpajakan. Sementara itu, pelatihan yang berfokus pada pengembangan etika profesional memperkuat kemampuan akuntan untuk mengenali dan menangani dilema etika. Sertifikasi, seperti CPA atau CA, tidak hanya meningkatkan kredibilitas seorang akuntan tetapi juga

menunjukkan komitmen terhadap standar profesionalisme yang tinggi (Anggoro Kr dkk., 2023).

Penerapan etika yang kuat juga berdampak positif pada organisasi tempat akuntan bekerja. Organisasi yang menekankan pentingnya etika dan tanggung jawab profesional cenderung memiliki reputasi yang lebih baik di mata publik, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Kepercayaan yang tinggi dari para pemangku kepentingan ini tidak hanya mendukung keberhasilan bisnis tetapi juga membantu organisasi menghindari masalah hukum dan keuangan yang dapat timbul akibat praktik yang tidak etis. Oleh karena itu, membangun budaya etika dalam organisasi bukan hanya langkah yang bijaksana tetapi juga investasi jangka panjang dalam keberlanjutan bisnis (Ackermann & Tunn, 2024).

Budaya etika yang kuat dalam sebuah organisasi tidak muncul begitu saja (Bokor, 2019). Budaya ini dimulai dari puncak, yaitu pimpinan, dan menyebar ke seluruh lapisan staf. Pemimpin organisasi harus menetapkan standar etika yang tinggi dan konsisten dalam semua tindakan. Tidak hanya bertanggung jawab untuk mendefinisikan nilai-nilai etika, tetapi juga untuk menghidupkannya dalam setiap keputusan dan interaksi. Pimpinan yang menunjukkan komitmen nyata terhadap etika akan memotivasi staf untuk mengikuti jejak, menciptakan budaya kerja di mana integritas menjadi landasan utama. Hal ini penting karena karyawan cenderung meniru perilaku atasan, terutama dalam situasi yang melibatkan dilema etika.

Akuntan senior dan manajer memiliki peran kunci dalam menjaga budaya etika di dalam organisasi. Tidak hanya bertindak sebagai panutan bagi staf junior tetapi juga sebagai pembimbing dan mentor dalam memahami dan menerapkan standar etika yang diharapkan. Dengan mempraktikkan perilaku etis dalam pekerjaan sehari-hari, akuntan senior dapat menunjukkan bagaimana keputusan yang beretika dapat memengaruhi hasil akhir dengan cara yang positif. Selain itu, memiliki tanggung jawab untuk secara aktif mengajarkan pentingnya etika kepada karyawan baru (Baabdullah, 2024), memastikan bahwa setiap anggota tim

memahami dan menghargai nilai-nilai yang dipegang oleh organisasi.

Kebijakan etika dalam organisasi tidak boleh hanya sekadar dokumen formal yang tersimpan di laci kantor atau dipajang di dinding. Kebijakan ini harus diimplementasikan dalam praktik sehari-hari agar dapat efektif. Akuntan senior dan manajer harus memastikan bahwa kebijakan etika tersebut dipahami dan diterapkan oleh seluruh staf. Ini bisa mencakup berbagai aspek, seperti menetapkan prosedur pelaporan yang jelas untuk pelanggaran etika, mendorong transparansi dalam semua aktivitas keuangan, dan menegakkan aturan dengan tegas namun adil. Dengan memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar diikuti, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang menghargai kejujuran dan integritas (Ushiyama, 2021).

Pelaporan internal yang transparan dan audit etika secara berkala merupakan langkah-langkah penting dalam mempertahankan standar etika yang tinggi. Transparansi memungkinkan setiap anggota organisasi untuk melihat dan memahami bagaimana keputusan dibuat dan mengapa. Ini membangun kepercayaan antara staf dan manajemen, serta antara organisasi dan pemangku kepentingan eksternal. Audit etika, di sisi lain, berfungsi sebagai alat pengawasan untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur etika benar-benar dipatuhi. Melalui audit ini, organisasi dapat mengidentifikasi area yang perlu perbaikan dan mengambil tindakan korektif sebelum masalah menjadi lebih besar (J. Ahmad dkk., 2023).

Pelatihan etika yang berkelanjutan sangat penting untuk memperkuat budaya etika dalam organisasi. Situasi bisnis dan regulasi terus berubah, dan demikian pula tantangan etika yang mungkin dihadapi oleh akuntan dan staf lainnya. Dengan program pelatihan yang berkelanjutan, karyawan dapat diperbarui mengenai isu-isu etika terbaru dan cara menghadapinya. Pelatihan ini juga menjadi forum di mana karyawan dapat mendiskusikan dilema etika yang dihadapi dan mencari saran dari kolega atau atasan (Bagus & de la Horra, 2021). Dengan cara ini, organisasi dapat memastikan bahwa seluruh timnya memiliki alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk membuat keputusan etis secara konsisten.

Melalui upaya bersama dari pimpinan, akuntan senior, manajer, dan seluruh staf, sebuah organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang benar-benar mendorong integritas dan transparansi. Ketika semua lapisan organisasi berkomitmen terhadap nilai-nilai etika, tidak hanya reputasi organisasi yang akan meningkat, tetapi juga kepercayaan dan loyalitas klien serta pemangku kepentingan lainnya. Dalam jangka panjang, lingkungan kerja yang beretika akan memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan kesuksesan organisasi, menjadikannya lebih tahan terhadap risiko dan lebih responsif terhadap peluang. Dengan demikian, budaya etika yang kuat tidak hanya bermanfaat bagi individu di dalam organisasi (Almazrouei dkk., 2024), tetapi juga memperkuat posisi organisasi dalam industri dan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abakah, E. J. A., Tiwari, A. K., Oliyide, J. A., & Appiah, K. O. (2023). Analyzing the static and dynamic dependence among green investments, carbon markets, financial markets and commodity markets. *International Journal of Managerial Finance*. Scopus.
<https://doi.org/10.1108/IJMF-09-2021-0428>
- Abed, I. A., Hussin, N., Haddad, H., Almubaydeen, T. H., & Ali, M. A. (2022). Creative Accounting Determination and Financial Reporting Quality: The Integration of Transparency and Disclosure. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 8(1), 38.
<https://doi.org/10.3390/joitmc8010038>
- Abrantes, B. F., & Ström, E. (2023). Business utilitarian ethics and green lending policies: A thematic analysis on the Swedish global retail and commercial banking sector. *International Journal of Business Governance and Ethics*, 17(4), 443–470. Scopus.
<https://doi.org/10.1504/IJBGE.2023.132087>
- Abu Elbeh, I. M. (2024). E-Commerce and Digital Currencies Risk Management Challenges. Dalam *Studies in Systems, Decision and Control* (Vol. 489, hlm. 343–354). Scopus.
https://doi.org/10.1007/978-3-031-36895-0_28
- Ackermann, L., & Tunn, V. S. C. (2024). Careless product use in access-based services: A rebound effect and how to address it. *Journal of Business Research*, 177, 114643.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2024.114643>
- Adams, K., Attah-Boakye, R., Yu, H., Chu, I., & Ishaque, M. (2023). Competence and enterprise of management as drivers of early foreign listing of medium-sized emerging market multinationals (EMNEs) from Africa. *Journal of Business Research*, 158, 113660.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.113660>
- Adela, V., Agyei, S. K., Frimpong, S., Awisome, D. B., Bossman, A., Abosompim, R. O., Benchie, J. K. O., & Ahmed, A. M. A. (2024). Bookkeeping practices and SME performance:

- The intervening role of owners' accounting skills. *Heliyon*, 10(1), e23911. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e23911>
- Aftabi, S. Z., Ahmadi, A., & Farzi, S. (2023). Fraud detection in financial statements using data mining and GAN models. *Expert Systems with Applications*, 227, 120144. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2023.120144>
- Ahmad, A., Naseer, Z., & Zakariyah, H. (2023). Impact of Electronic Service Quality on Customer Satisfaction of Islamic Banks in Pakistan. Dalam *Contributions to Management Science: Vol. Part F1204* (hlm. 435-443). Scopus. https://doi.org/10.1007/978-3-031-27860-0_39
- Ahmad, J., Al Mamun, A., Masukujjaman, M., Mohamed Makhbul, Z. K., & Mohd Ali, K. A. (2023). Modeling the workplace pro-environmental behavior through green human resource management and organizational culture: Evidence from an emerging economy. *Heliyon*, 9(9), e19134. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19134>
- Ahmed, E. M. (2023). Big Data Analytics Implications on Central Banking Green Technological Progress. *International Journal of Information Technology and Decision Making*. Scopus. <https://doi.org/10.1142/S0219622023500669>
- Aibar-Guzmán, B., Aibar-Guzmán, C., Piñeiro-Chousa, J.-R., Hussain, N., & García-Sánchez, I.-M. (2023). The benefits of climate tech: Do institutional investors affect these impacts? *Technological Forecasting and Social Change*, 192. Scopus. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.122536>
- Aidi, A., Sayuthi, S., Susanto, I., Junaidi, A., & Abdurohim, A. (2022). The Effect of Competencies and Independence Internal Auditors on Internal Audit Quality: The Theoretical Review Approach. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 3(1), 103-116.
- Allakulov, U., Cocciolo, S., Das, B., Habib, M. A., Rambjer, L., & Tompsett, A. (2023). Transparency, governance, and water and sanitation: Experimental evidence from schools in rural Bangladesh. *Journal of Development*

- Economics*, 163. Scopus.
<https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2023.103082>
- Almazrouei, F., Elias Sarker, A., Zervopoulos, P., & Yousaf, S. (2024). Organizational structure, agility, and public value-driven innovation performance in the UAE public services. *Heliyon*, 10(13), e33261.
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e33261>
- Ang, S. Y., & Wickramasinghe, D. (2023). Ethical disputes, coordinating acts and NGO accountability: Evidence from an NGO river-care programme in Malaysia. *Critical Perspectives on Accounting*, 92. Scopus.
<https://doi.org/10.1016/j.cpa.2022.102416>
- Anggoro Kr, M. Y. A. R., Samsudin, H., Akmal, S., Cakranegara, P. A., & Abdurohim, A. (2023). Analisis Peningkatan Performa Dosen Menggunakan Konsep Job Demand-Control Support. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(2), 1308–1319.
<https://doi.org/10.31539/costing.v6i2.5277>
- Angotti, M., Ferreira, A. C. S., Eugénio, T., & Branco, M. C. (2024). A narrative approach for reporting social and environmental accounting impacts in the mining sector – giving marginalized communities a voice. *Meditari Accountancy Research*, 32(1), 42–63. Scopus.
<https://doi.org/10.1108/MEDAR-11-2021-1513>
- Aruga, K. (2024). Are retail investors willing to buy green bonds? A case for Japan. *Journal of Sustainable Finance and Investment*. Scopus.
<https://doi.org/10.1080/20430795.2024.2349723>
- Ataullah, A., Le, H., Wang, Z., & Wood, G. (2022). Corporate diversification and downsizing decisions: International evidence from sharp and sudden performance shocks. *International Review of Financial Analysis*, 82, 102203.
<https://doi.org/10.1016/j.irfa.2022.102203>
- Baabdullah, A. M. (2024). Generative conversational AI agent for managerial practices: The role of IQ dimensions, novelty seeking and ethical concerns. *Technological Forecasting*

- and *Social Change*, 198, 122951.
<https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.122951>
- Bagus, P., & de la Horra, L. P. (2021). An ethical defense of cryptocurrencies. *Business Ethics, the Environment and Responsibility*, 30(3), 423–431. Scopus.
<https://doi.org/10.1111/beer.12344>
- Balch, T., Diamond, B. E., & Polychroniadou, A. (2020). *SecretMatch: Inventory matching from fully homomorphic encryption*. ICAIF 2020 - 1st ACM International Conference on AI in Finance. Scopus.
<https://doi.org/10.1145/3383455.3422569>
- Benedetti, M., De Sclavis, F., Favorito, M., Galano, G., Giammusso, S., Muci, A., & Nardelli, M. (2023). *Certified Byzantine Consensus with Confidential Quorum for a Bitcoin-derived Permissioned DLT*. 3460. Scopus.
<https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85171168851&partnerID=40&md5=b45afd2dd4434c2fc e2f2d4a35f2532c>
- Bokor, T. (2019). From digital cradle to virtual grave ethical challenges in the real-virtual world. Dalam *New Approaches in Media and Communication* (hlm. 33–39). Scopus.
<https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85110362420&partnerID=40&md5=c8676e2921a6f7f58 c543b9ef5e86bff>
- Campos-García, I. (2022). Digital Transformation of the Spanish Banking Sector: Impact on Jobs and Roles. *UCJC Business and Society Review*, 19(72), 110–155. Scopus.
<https://doi.org/10.3232/UBR.2022.V19.N1.03>
- Chi, C. G., Chi, O. H., Xu, X., & Kennedy, I. (2022). Narrowing the intention-behavior gap: The impact of hotel green certification. *International Journal of Hospitality Management*, 107. Scopus.
<https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2022.103305>
- De la Puente, F., Sandoval, J. D., & Hernández, P. (2003). *Pocket device for authentication and data integrity on Internet banking applications*. 43–50. Scopus.

<https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-2342550636&partnerID=40&md5=d60a26b8428b65d16867507229368cc4>

- Herd, T., & Jonkman, A. R. (2023). The acceptance of density: Conflicts of public and private interests in public debate on urban densification. *Cities*, 140. Scopus. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2023.104451>
- Jellema, S. F., Werner, M. D., Rasche, A., & Cornelissen, J. (2022). Questioning Impact: A Cross-Disciplinary Review of Certification Standards for Sustainability. *Business and Society*, 61(5), 1042–1082. Scopus. <https://doi.org/10.1177/00076503211056332>
- Morrison, L. J., Alshamari, A., & Finau, G. (2024). Interrogating the environmental accountability of foreign oil and gas companies in Basra, Iraq: A stakeholder theory perspective. *Meditari Accountancy Research*, 32(1), 207–233. Scopus. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-08-2021-1425>
- Paletta, F.-C., Moreiro-González, J.-A., & Pastor-Sánchez, J.-A. (2021). Digital competences and abilities required from information professionals in brazilian online job ads. *Profesional de la Informacion*, 30(1), 1–17. Scopus. <https://doi.org/10.3145/epi.2021.ene.08>
- Ushiyama, Y. (2021). Integrity Strategies Derived From The Perspective Of Substantive, Logical And Three-Dimensional Thinking. *Academy of Strategic Management Journal*, 20(1), 1–13. Scopus.
- Abate, T. G., & Elofsson, K. (2024). Environmental taxation of plastic bags and substitutes: Balancing marine pollution and climate change. *Journal of Environmental Management*, 359, 120868. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2024.120868>
- Abbas, J., Balsalobre-Lorente, D., Amjid, M. A., Al-Sulaiti, K., Al-Sulaiti, I., & Aldereai, O. (2024a). Financial innovation and digitalization promote business growth: The interplay of green technology innovation, product market competition and firm performance. *Innovation and Green Development*, 3(1). <https://doi.org/10.1016/j.igd.2023.100111>

- Abbas, J., Balsalobre-Lorente, D., Amjid, M. A., Al-Sulaiti, K., Al-Sulaiti, I., & Aldereai, O. (2024b). Financial innovation and digitalization promote business growth: The interplay of green technology innovation, product market competition and firm performance. *Innovation and Green Development*, 3(1), 100111. <https://doi.org/10.1016/j.igd.2023.100111>
- Abebe Mamo, Y., Mesele Sisay, A., Dessalegn WoldeSilassie, B., & Worku Angaw, K. (2024). Corporate social responsibilities contribution for sustainable community development: Evidence from industries in Southern Ethiopia. *Cogent Economics and Finance*, 12(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2024.2373540>
- Abhyankar, N., Mohanty, P., Deorah, S., Karali, N., Paliwal, U., Kersey, J., & Phadke, A. (2023). India's path towards energy independence and a clean future: Harnessing india's renewable edge for cost-effective energy independence by 2047. *Electricity Journal*, 36(5). <https://doi.org/10.1016/j.tej.2023.107273>
- Afzal, A., Rasoulinezhad, E., & Malik, Z. (2022). Green finance and sustainable development in Europe. *Economic Research-Ekonomska Istrazivanja*, 35(1), 5150–5163. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2021.2024081>
- Ağca, A., Uçar, O., & Ufuk Uladi, Ş. (2024). Linking economic growth and international trade taxes in Turkey: A Fourier approach. *Heliyon*, 10(7), e28741. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e28741>
- Agung Nugroho, D. N., & Dawam, M. (2021). *Waste management model at Bugel Village—Kulonprogo District, Yogyakarta Special Province*. 819(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/819/1/012088>
- Akhtar, S., Tian, H., Alsedrah, I. T., Anwar, A., & Bashir, S. (2024). Green mining in China: Fintech's contribution to enhancing innovation performance aimed at sustainable and digital transformation in the mining sector. *Resources Policy*, 92. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2024.104968>
- Al-Ghalabi, R. R., Alsheikh, G. A. A., Al-Shamaileh, L. R., & Altarawneh, A. (2024). Impact of digital HR technology between green

- human resources and environmental performance in Jordanian banks. *Heritage and Sustainable Development*, 6(1), 267–286. <https://doi.org/10.37868/hsd.v6i1.512>
- Alhassan, G. N., Alola, A. A., & Bekun, F. V. (2023). Examining obesity kuznets curve in the United States from the perspective of globalization and biocapacity. *Heliyon*, 9(9), e19569. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19569>
- Ali, S., Yan, Q., Irfan, M., Ameer, W., Atchike, D. W., & Acevedo-Duque, Á. (2022). Green Investment for Sustainable Business Development: The Influence of Policy Instruments on Solar Technology Adoption. *Frontiers in Energy Research*, 10. <https://doi.org/10.3389/fenrg.2022.874824>
- Antunes, J. J. M., Neves, J. C., Elmor, L. R. C., Araujo, M. F. R. D., Wanke, P. F., & Tan, Y. (2023). A new perspective on the U.S. energy efficiency: The political context. *Technological Forecasting and Social Change*, 186. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.122093>
- Aradhna, X., Kumar, S., & Shukla, A. K. (2023). Role of multimedia innovative technology in green banking. Dalam *Contemporary Studies of Risks in Emerging Tech.: Part B* (hlm. 275–297). Emerald Group Publishing Ltd. <https://doi.org/10.1108/978-1-80455-566-820231015>
- Armah, M., Bossman, A., & Amewu, G. (2023). Information flow between global financial market stress and African equity markets: An EEMD-based transfer entropy analysis. *Heliyon*, 9(3), e13899. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e13899>
- Arora-Jonsson, S., & Gurung, J. (2023). Changing business as usual in global climate and development action: Making space for social justice in carbon markets. *World Development Perspectives*, 29. <https://doi.org/10.1016/j.wdp.2022.100474>
- Asad, M., Majali, T., Aledeinat, M., Abdelkarim Almajali, D., & Akhorshaideh, A. H. O. (2023). Green entrepreneurial orientation for enhancing SMEs financial and environmental performance: Synergetic moderation of green technology dynamism and knowledge transfer and integration. *Cogent*

- Business and Management*, 10(3).
<https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2278842>
- Azimi, M. N., & Rahman, M. M. (2024). Renewable energy and ecological footprint nexus: Evidence from dynamic panel threshold technique. *Heliyon*, 10(13), e33442.
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e33442>
- Beninger, S. (2022). Markets, Businesses, and Consumption in Refugees Settlements: A Review and Future Research Trajectory. *Markets, Globalization and Development Review*, 7(3). <https://doi.org/10.23860/MGDR-2022-07-03-03>
- Bhubalan, K., Tamothran, A. M., Kee, S. H., Foong, S. Y., Lam, S. S., Ganeson, K., Vigneswari, S., Amirul, A.-A., & Ramakrishna, S. (2022). Leveraging blockchain concepts as watermarkers of plastics for sustainable waste management in progressing circular economy. *Environmental Research*, 213.
<https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.113631>
- Black, S., Samson, D., & Ellis, A. (2024). Moving beyond ‘proof points’: Factors underpinning AI-enabled business model transformation. *International Journal of Information Management*, 77, 102796.
<https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2024.102796>
- Buckley, R. P., & Trzeciński, M. (2023). Central Bank Digital Currencies and the global financial system: The dollar dethroned? *Capital Markets Law Journal*, 18(2), 137–171.
<https://doi.org/10.1093/cmlj/kmad007>
- Che, S., Tao, M., Silva, E., Sheng, M. S., Zhao, C., & Wang, J. (2024). Financial misallocation and green innovation efficiency: China’s firm-level evidence. *Energy Economics*, 136.
<https://doi.org/10.1016/j.eneco.2024.107697>
- Chen, X., Xu, H., & Anwar, S. (2024). Bank competition, government interest in green initiatives and carbon emissions reduction: An empirical analysis using city-level data from China. *North American Journal of Economics and Finance*, 72.
<https://doi.org/10.1016/j.najef.2024.102144>
- Faieq, H. T., & Cek, K. (2024). Enhancing Kurdistan’s manufacturing companies’ sustainable waste management: A norm activation approach to green accounting, CSR, and

- environmental auditing oversight. *Heliyon*, 10(12), e32725. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e32725>
- German, J. D., Redi, A. A. N. P., Ong, A. K. S., & Liwanag, J. L. (2023). The impact of green innovation initiatives on competitiveness and financial performance of the land transport industry. *Heliyon*, 9(8), e19130. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19130>
- Iftikhar, H., Ullah, A., & Pinglu, C. (2024). From regional integrated development toward sustainable future: Evaluating the Belt and Road Initiative's spillover impact between tourism, Fintech and inclusive green growth. *Clean Technologies and Environmental Policy*. <https://doi.org/10.1007/s10098-024-02890-3>
- Kharel, M., Dahal, B. M., & Raut, N. (2022). Good agriculture practices for safe food and sustainable agriculture in Nepal: A review. *Journal of Agriculture and Food Research*, 10, 100447. <https://doi.org/10.1016/j.jafr.2022.100447>
- Lajoie-O'Malley, A., Bronson, K., van der Burg, S., & Klerkx, L. (2020). The future(s) of digital agriculture and sustainable food systems: An analysis of high-level policy documents. *Ecosystem Services*, 45. <https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2020.101183>
- Lulovicova, A., & Bouissou, S. (2024). Life cycle assessment as a prospective tool for sustainable agriculture and food planning at a local level. *Geography and Sustainability*, 5(2), 251–264. <https://doi.org/10.1016/j.geosus.2024.01.008>
- Shkarupa, O., Vlasenko, D., Vesperis, S., Treus, A., & Juhaszova, Z. (2021). Strategic management for sustainable decisions in business: A case of greening the transport companies. *Problems and Perspectives in Management*, 19(4), 311–324. [https://doi.org/10.21511/ppm.19\(4\).2021.25](https://doi.org/10.21511/ppm.19(4).2021.25)
- Susanto, T. D., & Maulana, M. D. (2024). Evaluating the Influence of Attitude versus Knowledge and Individual Factor versus Intervention Factor on Information Security Awareness in Local Government. *Procedia Computer Science*, 234, 1428–1434. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.03.142>

BIODATA PENULIS



Reny Dany Merliyana, S.Pd., M.Ak.
Dosen Program Studi Akuntansi S1
Fakultas Ekonomi, Universitas Garut
Email: renydany@uniga.ac.id

Penulis lahir di Bandung. Penulis seorang dosen tetap pada Program Studi Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi, Universitas Garut. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Pendidikan Ekonomi Program Akuntansi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, kemudian melanjutkan S2 pada Jurusan Magister Akuntansi Universitas Widyatama Bandung.

Selain menjadi dosen tetap, dan sebagai tutor untuk kegiatan tutorial online (Tuton) pada jurusan Manajemen S1 di Universitas Terbuka, penulis juga merupakan seorang wirausahawan di bidang kuliner, yang memiliki hobi memasak dan *travelling*.

BIODATA PENULIS



Widya Sari, S.E., M.E.Sy., Ak., CA., SAS.

Dosen Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Ma'soem

Penulis lahir di Palembang, tanggal 22 Desember 1977. Menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Akuntansi di Universitas Islam Indonesia, pada tahun 2000. Kemudian melanjutkan pendidikan pascasarjana dan meraih gelar Magister Ekonomi Syariah, konsentrasi Akuntansi Syariah, di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2014.. Setelah sebelumnya juga lulus Program Pendidikan Profesi Akuntan, pada tahun 2011, dari Universitas Islam Bandung.

Saat ini penulis berprofesi sebagai akuntan profesional dan menjadi *Partner* di Kantor Jasa Akuntan B'Right Konsultindo, selain berbagi ilmu sebagai dosen di Universitas Ma'soem. Penulis aktif pula dalam kepengurusan di organisasi profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jawa Barat.

BIODATA PENULIS



Wedia Hastuti, S.E, M.M.

Dosen Tetap Program Studi Ekonomi Manajemen
STIE Bhakti Pembangunan

Penulis lahir di Makassar tanggal 5 Juli 1975. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ekonomi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bhakti Pembangunan. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi di Universitas Trisakti dan melanjutkan S2 pada Jurusan Manajemen Keuangan di Magister Manajemen Universitas Indonesia.

Pengalaman kerja, selama 8 tahun bekerja di Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu) dari tahun 1998-2006, kemudian 8 tahun di PT Earindo Consulting (Untuk project FSSC-PT Unilever Indonesia) 2006-2014, kemudian resign mendirikan usaha pribadi di bidang fashion busana wanita sampai dengan sekarang, dan pada tahun 2021 sampai dengan sekarang sebagai dosen ilmu ekonomi manajemen di STIE Bhakti Pembangunan, penulis mengajar mata kuliah pengantar akuntansi, akuntansi keuangan 2, dan manajemen keuangan.

BIODATA PENULIS



Rizal Zaelani, SE., MM.

Dosen Program Studi Akuntansi

Fakultas Sosial Ekonomi Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi

Penulis lahir di Sukabumi tanggal 20 Juni 1971. Penulis adalah dosen tetap Program Akuntansi, Fakultas Sosial Ekonomi Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi. Menyelesaikan pendidikan (S1) Jurusan Akuntansi serta melanjutkan (S2) Jurusan Manajemen Sumberdaya Manusia. Sedang Melanjutkan S3 Program Doktor Ilmu Manajemen Keuangan. Penulis menekuni bidang Menulis, Sejak kuliah, telah terlibat dalam penelitian dan menulis karya ilmiah. Salah satunya adalah mendapatkan hibah penelitian dari Kementrian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi RI. tahun 2020 dengan judul *Public Perceptions in Analyzing the Differences Between Cooperatives and Bank Emok in Sukabumi*, selanjutnya mendapatkan hibah penelitian pada tahun 2022 dengan judul *The Influence of Islamic Financial Literacy, Innovation and the Government on the Sustainability of MSMEs in Sukabumi City*.

Kegiatan penelitian dan penulisan juga masih tetap dilaksanakan sebagai pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi dengan menghasilkan jurnal ilmiah, diktat pengajaran seperti Berlatih Akuntansi Manajemen, dan saat ini Buku Akuntansi Keuangan Menengah, Sistem Pengendalian Manajemen, Strategi Keuangan Perusahaan: Manajemen Modal Dan Struktur Modal, Perpajakan, Membangun Fondasi Keuangan: Pengantar Praktis

Untuk Akuntansi Dalam Bisnis, Akuntansi Keuangan Menengah 2, Asas-Asas Manajemen & Pengantar Akuntansi: Panduan Praktis Untuk Memahami Laporan Keuangan , tahun 2024 hingga saat ini.

BIODATA PENULIS



Dr. Abdurohim, SE, MM.

Kelahiran Cirebon (Jawa Barat) 12 April 1964, berkecimpung sebagai praktisi Perbankan selama 31 tahun pada PT. Bank Papua, dengan jabatan terakhir *Vice President* pada Divisi Perencanaan Strategis (Renstra).

Keahlian yang dimiliki adalah Audit Perbankan, Perencanaan Strategis, Pemasaran, *Manajemen Human Capital*, Penyusunan BPP & SOP dan Struktur Organisasi Perusahaan Perbankan.

Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Manajemen Keuangan dari Universitas Cendrawasih (2017), Pendidikan Magister Manajemen (S2)-Manajemen Keuangan, dari Universitas Hasanudin (2003), dan Pendidikan Sarjana (S1) Manajemen Keuangan & Perbankan dari STIE YPKP Bandung (1989). Saat ini sebagai pengajar/dosen tetap (Lektor) pada Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Jawa Barat.

Telah menyelesaikan penulisan buku (Kolaborasi) sebanyak: 125 buah terdiri dari Book Chapter 119 buku, dan 4 buku Penulis tunggal, diantaranya:

E-Commerce (Strategi dan Inovasi Bisnis berbasis Digital), Analisa Laporan Keuangan, Anggaran Operasional Perusahaan Manufaktur, Bank dan lembaga Keuangan Lainnya, Etika Bisnis Suatu Pengantar, HRM in Industry 5.0, Isu-Isu Kontemporer Akuntansi Manajemen, Kesehatan Lingkungan suatu pengantar, Knowledge Management, Marketing Tourism Service, Menakar Ekonomi masa pademi & New normal, New Normal Era Edisi II,

Operations Management, Tantangan Pendidikan Indonesia di Masa depan, Teori dan Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia, The Art of Branding, Pasar Modal Syariah, Manajemen Pemasaran (Implementasi Strategi Pemasaran di Era Society 5.0). Perencanaan & Simulasi Bisnis, Manajemen Strategi, Business Sustainability, eCommerce, Mencari wajah pembangunan di Indonesia, Business Intelligence, Digital Economy e Government, Analisa Laporan Keuangan, Metode Penelitian Kualitatif, Pengantar Manajemen, Manajemen Konflik, Sistem Transaksi Keuangan, Kebijakan Perpajakan di Indonesia,. Keuangan Daerah (Perencanaan & Anggaran Daerah), Konsep dasar Akuntansi, Financial Technology, HRM: Perencanaan & Rekrutmen SDM

Telah mengikuti pendidikan/Lulus (Profesional): Sekolah Pimpinan Bank (Sespibank), Sekolah Pemimpin Cabang, Manajemen Risiko level 4, Keuangan Berkelanjutan (SDGs).

Bersertifikat : Dosen Profesional (Serdos) dari Kemendikbudristek

Anggota : *Project Management Office* Indonesia (POM-PI)

Email : Abdurrohim@mn.Unjani.ac.id